

**PENGARUH KEBIJAKAN PIMPINAN, PENDAPATAN, DAN
PENGETAHUAN AGAMA TERHADAP KESEDIAAN PEGAWAI ASN
KANTOR DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN MEMBAYAR
ZAKAT PROFESI MELALUI PEMOTONGAN GAJI**

Oleh :

Jamilah Harahap

NIM 0501176315

Program Studi

EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
TAHUN 2019**

**PENGARUH KEBIJAKAN PIMPINAN, PENDAPATAN, DAN
PENGETAHUAN AGAMA TERHADAP KESEDIAAN PEGAWAI ASN
KANTOR DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN MEMBAYAR
ZAKAT PROFESI MELALUI PEMOTONGAN GAJI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jamilah Harahap

NIM 0501176315

Program Studi

EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jamilah Harahap
NIM : 0501176315
Tempat Tanggal Lahir : Sidikalang, 09 Mei 1997
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Usman Siddik Psr IV No.81 Bandar Khalifah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Kebijakan Pimpinan, Pendapatan dan Pengetahuan Agama Terhadap Kesiediaan Pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Membayar Zakat Profesi**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 11 Februari 2019

Yang membuat pernyataan

Jamilah Harahap

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**PENGARUH KEBIJAKAN PIMPINAN, PENDAPATAN, DAN
PENGETAHUAN AGAMA TERHADAP KESEDIAAN PEGAWAI ASN
KANTOR DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA MEDAN MEMBAYAR
ZAKAT PROFESI MELALUI PEMOTONGAN GAJI**

Oleh :

Jamilah Harahap

NIM 0501176315

**Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 17 Januari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 197305101998031003

Aqwa Naser Daulay, M.Si
NIB. 1100000091

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dr. Marliyah, M.Ag
NIP.197601262003122003

Skripsi berjudul **“Pengaruh Kebijakan Pimpinan, Pendapatan dan Pengetahuan Agama Terhadap Kesiapan Pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji”** atas nama Jamilah Harahap, NIM 0501176315 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 11 Februari 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 11 Februari 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,

Sekretaris,

Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 197305101998031003

Kusmilawaty, M.Ak
NIP.198006142015032001

Anggota

Hendra Harmain, M.Pd
NIP. 197305101998031003

Aqwa Naser Daulay, M.Si
NIB. 1100000091

Muhammad Yafiz, Dr. M. Ag
NIP.197604232003121002

Nurbaiti, M.Kom
NIP. 197908082015032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN-SU Medan

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP.197605072006041002

ABSTRAK

Jamilah Harahap, NIM 0501176315 “**Pengaruh Kebijakan Pimpinan, Pendapatan dan Pengetahuan Agama Terhadap Kesiediaan Pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji**”. Dengan Pembimbing I Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd dan Pembimbing II Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan Perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. ASN (Aparatur Sipil Negara) menjadi salah satu profesi yang menjabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setelah adanya arahan dan bimbingan Walikota Medan tentang perihal Optimalisasi Pengumpulan Zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk seluruh SKPD, Camat, Lembaga dan Instansi Vertikal yang dilaksanakan oleh BAZNAS, faktanya dari 34 SKPD Kota Medan hanya ada 4 SKPD yang menerapkan zakat profesi ASN melalui pemotongan gaji. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran lembaga tentang zakat profesi dan tidak adanya dukungan dari pimpinan SKPD masing-masing. Dengan adanya permasalahan ini penulis melakukan penelitian untuk mengetahui apakah kebijakan pimpinan, pendapatan dan pengetahuan agama berpengaruh terhadap kesiediaan pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji. Penelitian ini merupakan penelitian langsung (*field research*). Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data diambil menggunakan kuisioner dengan tehnik penarikan sampel jenuh terhadap pegawai muslim, kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan analisis regresi. Peneliti menggunakan program olah data SPSS Versi. 20. Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah kebijakan pimpinan, pendapatan dan pengetahuan agama. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, variabel independen yaitu kebijakan pimpinan (X_1) dengan tingkat signifikan dari variabel sebesar $0,006 < 0,05$ dan nilai dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $2,966 > 2,045$, pendapatan (X_2) dengan tingkat signifikan dari variabel sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $5,636 > 2,045$ dan pengetahuan agama (X_3) dengan tingkat signifikan dari variabel sebesar $0,003 < 0,05$ dan nilai dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $3,222 > 2,045$ berpengaruh secara parsial terhadap kesiediaan pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji, dan berpengaruh secara bersama-sama dengan hasil uji F (Simultan) yaitu $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai $127,399 > 2,93$.

Kata Kunci : Kebijakan, Pendapatan, Pengetahuan Agama dan Kesiediaan Membayar

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah menganugerahkan nikmat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi tentang **“Pengaruh Kebijakan Pimpinan, Pendapatan dan Pengetahuan Agama Terhadap Kesiapan Pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Membayar Zakat Profesi”**. Shalawat dan salam juga tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai *uswatun hasanah* dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun maksud dari penulisan proposal ini adalah sebagai salah satu syarat untuk disetujui sebagai langkah awal penyusunan skripsi yang ditujukan dalam rangka meraih gelar Strata Satu (S1) jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terimakasih karena telah memberi kesempatan bagi penulis untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dalam penyusunan jadwal kuliah, sehingga saya bisa mengikuti perkuliahan dan sekaligus menulis proposal skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA Selaku penasehat akademik yang telah dengan sabar membimbing saya sehingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd sebagai pembimbing skripsi I yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Aqwa Naser Daulay, M.Si, sebagai pembimbing skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu istirahatnya dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Ayah, ibu, abangda dan adinda saya yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan baik moril dan materil selama perkuliahan saya dan juga selama penulisan skripsi ini.
9. Ustadzah Fitri Malyani, S.Pd, Sania Nurjannah, Wardatussaniah, Aisyah Tanjung beserta teman-teman asrama Daarul Uswah yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam mengerjakan skripsi saya.
10. Isna Ayu Rambe, Putri Sarah Farucha, Saniah Sinaga, Yefrita Heldawati, Nahdhia Fallah, Aulia Ul Mardiyah, Lestika Ramayana, Siti Nurhasanah yang telah bersedia menemani dan memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi saya.
11. Teman-teman Alih Jenjang jurusan Ekonomi Islam, beserta teman seperjuangan KKN 81 Desa Sebertung.
12. Dan semua pihak yang telah berkenan membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari akan kurang sempurnaan penulisan skripsi. Oleh sebab itu, segala kritik maupun saran sangat penulis harapkan.

Medan, 18 Januari 2019

Jamilah Harahap

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Zakat Profesi	9
1. Pengertian zakat profesi	9
2. Tujuan, fungsi dan hikmah zakat profesi	11
3. Khilafiyah tentang zakat profesi	14
4. Waktu pengeluaran zakat profesi	18
5. Sasaran zakat profesi.....	19
B. Kesiediaan Membayar Zakat Profesi	24
1. Pengertian kesiediaan	24
2. Faktor-faktor kesiediaan.....	25
C. Kebijakan / Instruksi Pimpinan.....	27
1. Kepemimpinan, kekuasaan dan wewenang.....	27
2. Motivasi dan tindakan	28
3. Kepemimpinan dalam Islam	29

D. Pendapatan	32
1. Pengertian pendapatan	32
2. Unsur pendapatan.....	33
3. Pendapatan menurut Islam	34
E. Pengetahuan Agama.....	37
1. Pengertian pengetahuan	37
2. Dasar-dasar pengetahuan	38
3. Jenis pengetahuan.....	40
F. Kajian Terdahulu.....	41
G. Kerangka Teoritis.....	43
H. Hipotesa.....	44

BAB III METODE PENELITIAN46

A. Pendekatan penelitian.....	46
B. Lokasi penelitian	46
C. Sumber data.....	46
D. Populasi dan sampel.....	47
E. Defenisi operasional.....	48
F. Teknik dan instrumen pengumpulan bahan	51
G. Analisis data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN.....56

A. Deskripsi Data	56
B. Deskripsi Tempat Penelitian	56
C. Deskirpsi Hasil Penelitian	59
1. Karakteristik Responden	59
2. Deskripsi Variabel.....	61
3. Teknik Analisa Data.....	72
a. Uji Kualitas Data.....	72
1) Uji Validitas	72

2) Uji reliabilitas	76
b. Uji Asumsi Klasik	78
1) Uji Normalitas	78
2) Uji Multikolonieritas	79
3) Uji Heteroskedastisitas	80
c. Uji Regresi Berganda	81
d. Uji Hipotesis	83
1) Uji R^2	83
2) Uji F	83
3) Uji t	84
D. Pembahasan Hasil Penelitian	86
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

1.2	Data Kantor SKPD Yang Menerapkan Zakat Profesi Melalui Potongan Gaji Setiap Bulan.....	4
1.2	Data Penghimpunan Dana Zakat Profesi ASN Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan	5
2.1	Kajian Terdahulu.....	46
3.1	Kisi-Kisi Penilaian Kebijakan Pimpinan	52
3.2	Kisi-Kisi Penilaian Pendapatan.....	53
3.3	Kisi-Kisi Penilaian Pengetahuan Agama	54
3.4	Kisi-Kisi Penilaian Kesiediaan Membayar Zakat Profesi.....	54
4.1	Pengukuran Skala Likert.....	63
4.2	Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	63
4.3	Identifikasi Responden Berdasarkan Usia	64
4.4	Identifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan	64
4.5	Responden Terhadap Kebijakan Pimpinan (X_1)	65
4.6	Responden Terhadap Pendapatan (X_2)	68
4.7	Responden Terhadap Pengetahuan Agama (X_3).....	71
4.8	Responden Terhadap Kesiediaan Pegawai Asn Membayar Zakat Profesi (Y_1)	73
4.9	Uji Validitas Kebijakan Pimpinan	76
4.10	Uji Validitas Pendapatan.....	77

4.11	Uji Validitas Pengetahuan Agama	78
4.12	Uji Validitas Kesiediaan Membayar Zakat Profesi	79
4.13	Uji Reliabilitas Kebijakan Pimpinan.....	80
4.14	Uji Reliabilitas Pendapatan	80
4.15	Uji Reliabilitas Pengetahuan Agama	81
4.16	Uji Reliabilitas Kesiediaan Membayar Zakat Profesi	81
4.17	Uji Normalitas	83
4.18	Uji Multikolonieritas	84
4.19	Uji Heteroskedastisitas Glejser	85
4.20	Uji Koefisien Regresi	86
4.21	Uji Koefisien Determinasi.....	86
4.22	Uji F	87
4.23	Uji t	88

DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Teoritis.....	47
4.1	Peta Jabatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pilar utama dalam Islam adalah perintah zakat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslimin yang kaya ketika memenuhi *nisab* (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun). Secara sosiologis zakat bertujuan untuk pemeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa maupun profesi belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia. Untuk merealisasikan tujuan zakat, disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat, tidaklah memadai bila yang dikenai zakat hanya terbatas pada ketentuan teks secara eksplicit. Sementara itu, realitas sosial ekonomi di masyarakat menunjukkan semakin meluas dan bervariasi jenis lapangan kerja dan sumber penghasilan pokok dibarengi dengan mulai berkurangnya minat sebagian masyarakat terhadap jenis pencarian yang potensial terkena kewajiban zakat. Lalu apa jadinya bila suatu saat jenis penghasilan yang terkena kewajiban zakat makin berkurang, sedangkan pencaharian tak kena zakat semakin bertambah. Fenomena diatas, secara esensial bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, sebab petani yang penghasilannya kecil justru diwajibkan membayar zakat, sementara seorang eksekutif, seniman, atau dokter justru dibiarkan tidak membayar zakat.

Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan : “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai

dengan syariat Islam”. Hal ini berarti bahwa ibadah zakat wajib hukumnya bagi orang muslim maupun badan usaha.¹

Zakat profesi yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, wiraswasta dan profesi lainnya. Zakat profesi pada awalnya tidak menjadi pembahasan oleh khazanah keilmuan Islam, tapi pada perkembangannya zakat profesi ini mulai menjadi trending topic setelah seorang cendikiam muslim dari Mesir, yakni Yusuf Qardawi mengemukakan hal tersebut.²

Apabila dilihat dari sejarah perkembangan fiqh zakat, maka tidak ditemukan adanya penegasan zakat profesi. Padahal zakat profesi seperti juga zakat lainnya dapat menjadi salah satu dana yang cukup besar dan potensial serta rutin untuk mendukung terwujudnya keadilan sosial. Dalam prakteknya, zakat ini nampaknya masih merupakan sesuatu yang langka dalam kalangan masyarakat yang berprofesi tinggi untuk dapat mengeluarkan zakat profesinya.

Meskipun tidak ditemukan kajian yang spesifik mengenai zakat profesi, bukan berarti zakat profesi tidak dikenal sama sekali dalam sejarah fikih Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pemungutan zakat telah sistematis dan terarah, termasuk pemungutan zakat berbagai profesi. Pungutan zakat profesi didasarkan pada kandungan QS. Al- Baqarah (2) : 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِتَّخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

¹Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 1-2.

²Ibid, h. 93,.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman , nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.³

Perbedaan beberapa pendapat ulama yang mewajibkan zakat profesi hanyalah pada persyaratan haul saja dimana beberapa berpendapat bahwa zakat tidak wajib dikeluarkan sebelum harta mencapai satu nisab. Dalam hal ini persyaratan haul ada beberapa pendapat, *pertama* jumhur ulama menyatakan bahwa apabila harta itu telah mencapai satu nishab, maka boleh dikeluarkan zakatnya, sekalipun belum mencapai haul (satu tahun). Karena sebab wajib zakat itu telah terpenuhi yakni mencapai satu nisab. Sementara itu, ulama madzhab Syafi’i mengemukakan bahwa mendahulukan pembayaran zakat sebelum haul hanya diperbolehkan apabila harta itu tetap utuh satu nisab sampai akhir haul. *Kedua*, ulama madzhab Maliki dan az-Zahiri berpendapat bahwa tidak boleh membayarkan zakat sebelum haul. Oleh sebab itu pembayaran zakat sebelum haul hukumnya tidak sah.

Baznas kota Medan menindaklanjuti arahan dan bimbingan Walikota Medan pada acara sosialisasi Zakat yang dilaksanakan BAZNAS Kota Medan dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat pada tanggal 01 November 2017 di Hotel Grand Kanaya Medan yang dihadiri oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, Lembaga dan Instansi Vertikal, dengan mengeluarkan hasil rapat berupa himbauan atas perihal Optimalisasi Pengumpulan Zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui potongan gaji setiap bulannya yang disalurkan kepada BAZNAS Kota Medan melalui Bank Sumut Syariah.

³Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz Zakah : Dirastu Muqoranatu Li Akhkamiha wa Falsafatiha fi Dhau’i al-Qur’an wa ash-Shunnah*, (Juz, I : Beirut : Muassasatu Ar-Risalah, 1991), h. 398.

Setelah dikeluarkannya hasil rapat berupa himbauan tentang perihal Optimalisasi Pengumpulan Zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk seluruh SKPD, Camat, Lembaga dan Instansi Vertikal, fakta dilapangan membuktikan bahwa tidak semua lembaga yang telah disebutkan diatas melaksanakan zakat profesi melalui potongan gaji setiap bulannya termasuk oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurut data dari BAZNAS Kota Medan selaku lembaga yang berwenang saat ini untuk melaksanakan tugas pengumpulan zakat pegawai, dari 34 SKPD di Kota Medan hanya ada 4 SKPD yang menerapkan zakat profesi melalui potongan gaji setiap bulannya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Daftar Kantor SKPD Yang Menerapkan Zakat Profesi Melalui
Potongan Gaji Setiap Bulan Tahun 2017-2018**

No	Nama Kantor Dinas
1	Kantor Dinas Lingkungan Hidup
2	Kantor Dinas Catatan Sipil
3	Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.
4	Kantor Dinas Ketahanan Pangan

Sumber Data : BAZNAS Kota Medan

Rendahnya kesadaran lembaga dalam menerapkan zakat profesi dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan tentang zakat profesi, motivasi dalam membantu sesama, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, profesionalitas sebagai seorang yang berprofesi dan yang terpenting yaitu kebijakan atau instruksi dari pimpinan kepada anggota untuk membantu melaksanakan dan menerapkan hasil rapat perihal tentang Optimalisasi

Pengumpulan Zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui potongan gaji setiap bulannya.

Seperti yang diketahui ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah (tenaga kontrak). Mereka diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian yang disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan undang-undang. Pegawai ASN berhak mendapat gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, perlindungan serta pengembangan kompetensi. Sehingga sudah sepatutnya pegawai ASN mengeluarkan zakat atas profesinya untuk kemudian digunakan sebagai alat pengentasan kemiskinan di Indonesia, dikarenakan pegawai ASN sudah pasti mempunyai gaji yang tetap dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak tetap penghasilannya. Begitu besar potensi dari zakat profesi / penghasilan Aparatur Sipil Negara apabila semua bisa terkumpul dan tersalurkan dengan baik. Seperti terlihat dari penghimpunan dana zakat profesi pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan sebagai berikut :

Tabel 1.2

**Data Penghimpunan Dana Zakat Profesi PNS Dinas Ketahanan Pangan
Kota Medan Juli 2017 s/d Juni 2018**

Tahun	Bulan	Total
2017	Juli	Rp. 2.062.391
2017	Agustus	Rp. 1.317.947
2017	September	Rp. 1.267.947
2017	Oktober	Rp. 1.187.947
2017	November	Rp. 1.137.947
2017	Desember	Rp. 1.994.707
2018	Januari-Februari	Rp. 4.465.723
2018	Maret	Rp. 2.389.314
2018	April	Rp. 3.657.176
2018	Mei	Rp. 3.445.364
2018	Juni	Rp. 3.424.791

Sumber Data : BAZNAS Kota Medan

Menurut BAZNAS Kota Medan zakat profesi yang wajib dikeluarkan pegawai ASN yaitu saat penghasilan sudah mencapai nishab yaitu 524 Kg beras atau setara Rp. 524.000,- perbulan dengan kadar 2,5% dari penghasilan Bruto, hal ini berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS No. KEP 016/BP/BAZNAS/XII/2015 Tentang Nishab Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016. Zakat profesi akan lebih mudah dikumpulkan apabila dilakukan pemotongan dari penghasilan pegawai yang selanjutnya akan diserahkan kepada lembaga BAZNAS yang bersifat transparan sehingga dana zakat profesi yang telah terkumpul dapat digunakan semaksimal mungkin untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.

Maka untuk mengetahui lebih jelas tentang zakat profesi di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Kebijakan Pimpinan, Pendapatan Dan Pengetahuan Agama Terhadap Kesiapan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji”.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Penerapan zakat profesi pegawai ASN belum sepenuhnya diterapkan di seluruh kantor SKPD Kota Medan. Dari 34 SKPD Kota Medan, BAZNAS menyampaikan hanya ada 4 SKPD yang menerapkan zakat profesi melalui pemotongan gaji.
2. Terdapat perbedaan pandangan mengenai penerapan zakat profesi pegawai ASN melalui pemotongan gaji setiap bulannya.
3. Adanya Perbedaan pendapat mengenai ketentuan jumlah pendapatan yang harus dikeluarkan zakatnya.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah ditetapkan agar menghindari kesimpangsiuran dalam membahas dan menganalisa permasalahan. Batasan masalah dalam penelitian

ini hanya pada pengaruh faktor kebijakan pimpinan, pendapatan dan pengetahuan agama terhadap kesediaan pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji.

D. Rumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan pimpinan berpengaruh terhadap kesediaan pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji?
2. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap kesediaan pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji?
3. Apakah pengetahuan agama berpengaruh terhadap kesediaan pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji?
4. Apakah kebijakan pimpinan, pendapatan dan pengetahuan agama berpengaruh terhadap kesediaan pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pimpinan terhadap kesediaan pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap kesediaan pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji.

3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan agama terhadap kesediaan pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji.
4. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pimpinan, pendapatan dan pengetahuan agama terhadap kesediaan pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, sebagai bahan kajian serta referensi untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi peneliti sendiri tentang zakat profesi.
2. Bagi instansi yang bersangkutan, hasil ini diharapkan dapat dijadikan referensi pada instansi.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini bisa memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu “keberkahan”, al-namaa’ “pertumbuhan dan perkembangan, ath-thaharatu “kesucian”. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu sama lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹

Makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek di dalamnya. *Pertama*, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. *Kedua*, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.²

Zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawawi mengutip pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan

¹Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : PR Remaja Rosdakarya, 2008) h, 119.

²M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h, 33.

itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 sebagai pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dalam Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Pada pasal 4 ayat 2 poin h dijelaskan bahwa salah satu zakat mal adalah pendapatan dan jasa. Dalam Undang-Undang ini tidak tersurat adanya istilah zakat profesi akan tetapi dalam pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa bukti setoran zakat dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.⁶

Berdasarkan pemahaman diatas bahwa objek zakat penghasilan bisa disebut dengan istilah zakat profesi. Dalam Ensiklopedi Islam zakat profesi termasuk dalam kelompok zakat mal, yaitu *al-maal almustafaad* (kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama.). Sejalan dengan hal tersebut Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa zakat profesi (penghasilan) adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi (pekerjaan) seseorang baik dokter, arsitek, notaris, karyawan, guru dan lain-lain.

Zakat merupakan bentuk *taqorrub* (pendekatan diri) kepada Allah, yang merupakan sarana penting untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Sebagaimana zakat juga dapat memberikan solusi untuk menanggulangi masalah kritis ekonomi yang menimpa umat manusia. Jika petani saja diwajibkan membayar zakatnya, maka para dokter, dosen, guru, pegawai lebih utama

⁶Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia, 2015), h, 125-126.

mengeluarkan zakat profesinya, karena selain lebih ringan, gajinya dalam beberapa bulan sudah melebihi nisab.⁷

2. Tujuan, Fungsi Dan Hikmah Zakat Profesi

Dasar hukum kewajiban zakat diketahui dalam Al-qur'an antara lain sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah : 9, 103)

Tujuan utama zakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada simiskin. Dengan menunaikan zakat akan terealisasi juga tujuan-tujuan berikutnya yaitu :

a. Berkaitan dengan muzakki

- 1) Zakat membersihkan muzakki dari penyakit pelit, dan membebaskannya dari penyembahan harta. Keduanya merupakan penyakit jiwa yang sangat berbahaya, yang membuat manusia jatuh dan celaka.
- 2) Zakat adalah latihan berinfak *fii sabilillah*. Dan Allah SWT menyebutkan infak *fii sabilillah* sebagai sifat wajib orang muttaqin dalam lapang maupun sempit dan menyertakannya sebagai sifat terpenting. Seseorang tidak akan pernah berinfak secara luas di jalan Allah kecuali setelah terbiasa membayar zakat yang merupakan batas wajib minimal yang harus di infakkan.

⁷Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h, 93-95.

- 3) Zakat adalah aktualisasi syukur nikmat yang Allah berikan, terapi hati dan membersihkannya dari cinta dunia. Dan sesungguhnya zakat adalah mekanisme membersihkan dan memperbanyak harta itu sendiri.

b. Berkaitan dengan penerima

- 1) Zakat akan membebaskan penerimanya dari tekanan kebutuhan, baik materi (seperti makan, pakaian, dan papan), kebutuhan psikis (seperti pernikahan), maupun kebutuhan maknawiah *fikriyah* (seperti buku-buku ilmiah). Karena zakat didistribusikan dalam semua kebutuhan diatas. Dengan itu seorang fakir akan dapat mengikuti kewajiban sosialnya.
- 2) Zakat membersihkan jiwa penerimanya dari penyakit hasad (iri) dan benci. Karena orang miskin yang sangat membutuhkan itu ketika melihat orang di sekitarnya hidup dengan mewah dan berlebih tetapi tidak mengulurkan bantuannya. Hal ini akan memutuskan tali persaudaraan, menghilangkan rasa cinta dan merusak kesatuan sosial.

c. Pengaruh zakat bagi masyarakat

Diantara kelebihan zakat dalam islam adalah ibadah fardiyah (individual) sekaligus sosial. Sebagai sebuah sistem, pengelolaan zakat membutuhkan karyawan untuk mengambilnya dari para orang kaya dan membagikannya kepada yang berhak. Mereka ini akan bekerja dan memperoleh imbalan dari pekerjaannya. Zakat sebagai sebuah tatanan sosial dalam Islam yang memiliki manfaat banyak sekali, diantaranya :

- 1) Zakat adalah hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh. Imam Az-Zuhriy menulis tentang zakat kepada Umar bin Abdul Aziz : bahwa disana terdapat bagian bagi orang-orang yang terkena bencana, sakit, orang-orang miskin yang tidak mampu berusaha di

muka bumi, orang miskin yang meminta-minta, bagi Muslim yang dipenjara sedang mereka tidak punya keluarga, bagi orang miskin yang datang ke mesjid tidak memiliki gaji dan pendapatan, tidak meminta-minta, ada bagian bagi orang yang mengalami kefakiran dan berhutang, bagian untuk musafir yang tidak memiliki tempat menginap dan keluarga yang menampungnya.

- 2) Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi. Karena seorang muslim yang menyimpan harta, berkewajiban mengeluarkan zakatnya minimal 2,5% setiap tahun. Hal ini akan mendorongnya untuk bersemangat mengusahakannya supaya zakat itu bisa dikeluarkan dari labanya. Inilah yang membuat uang itu keluar dari simpanan dan berputar dalam sektor riil. Ekonomi bergerak dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari putaran itu.
- 3) Zakat berperan besar dalam menghapus peminta-minta, dan mendorong perbaikan antara sesama. Maka ketika untuk membangun hubungan baik itu memerlukan dana, zakat dapat menjadi salah satu sumbernya.⁸

Fungsi dan hikmah zakat profesi antara lain :

- a. Menghindari kecemburuan sosial sehingga harta menjadi aman, karena kecemburuan sosial bisa menimbulkan kerawanan di masyarakat.
- b. Memberikan bantuan langsung kepada fakir miskin, apabila mereka mempunyai keterampilan maka uang bantuan itu dapat dipergunakan sebagai modal usaha kecil, dan apabila tidak

⁸Nurul Huda et, *Zakat Perspektif Mikro-Makro : Pendekatan Riset*, (Jakarta:Prenamedia Group, 2015), h, 2-10.

mempunyai keterampilan maka akan dipergunakan sebagai bantuan yang dapat meringankan beban hidupnya.

- c. Membersihkan muzakki dari sifat-sifat yang tidak terpuji dan tidak peduli kepada orang lain, karena orang mu'min yang telah membiasakan membayar zakat akan menjadi orang dermawan.
- d. Sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan memberikan kemudahan-kemudahan mencari rizki.⁹

3. Khilafiyah (Perbedaan Pendapat) Tentang Zakat Profesi

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam klasik. Kewajiban mengeluarkan zakat profesi tidak ditemukan landasan hukumnya secara qath'i (pasti), baik dalam Al-quran maupun hadits, sehingga ada perselisihan diantara para ulama kontemporer tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi secara khusus.¹⁰

Apabila pada saat ini ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa zakat profesi tidak diwajibkan, maka hal itu bisa diterima. Karena memang tidak ada dalil naqli dari Al-quran maupun hadits yang membahasnya secara khusus. Bahkan Rasulullah pun tidak mengajarkannya. Sementara itu, diantara ulama yang mewajibkan zakat profesi sekaligus pencetus adalah Yusuf Al-Qardhawi. Profesi seperti pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris, wiraswasta, merupakan sumber pendapatan (kasab) yang tidak banyak dikenal dimasa generasi terdahulu, oleh karenanya bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat. Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih

⁹Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang : UIN Malang Press, 2007), h, 4-6.

¹⁰Hadi Purnomo, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat* (Cet II : Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h, 8.

populer saat itu, seperti pertanian, peternakan, dan perniagaan mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail.

Meskipun demikian sebenarnya kewajiban mengeluarkan zakat itu tidak disebabkan oleh profesi seseorang. Akan tetapi bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat. Alasan utama seseorang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah seseorang itu telah diklasifikasikan sebagai orang kaya. Sebab zakat itu pada hakikatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin (sesuai dengan ketentuan syara'). Untuk itulah, batas minimal kepemilikan (nishab) menjadi standar ukuran seseorang dikatakan kaya yang kemudian lahir kewajiban mengeluarkan zakat baginya.¹¹

Dengan demikian apabila seseorang dengan penghasilan profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat, akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup (dan keluarganya), maka ia menjadi mustahiq (penerima zakat). Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidupnya, atau lebih sedikit maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yakni papan, sandang, pangan dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya.

Istilah ulama salaf terhadap zakat penghasilan atau profesi umumnya disebut dengan istilah *al-mal al-mustafad*. Termasuk didalam kategori zakat *al-mal- al-mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat seperti pegawai negeri atau swasta, dan dokter. Jama'ah sahabat dan para ulama menyepakati bahwa *al-mal- al-mustafad* ini wajib dikenakan zakatnya.

¹¹Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Cet I : Malang : UIN-Malang Press, 2006), h, 136-137.

Perbedaan pendapatnya hanya pada persyaratan haul yang akan dijelaskan sebagai berikut :¹²

- a. Abu Hanifah berpendapat bahwa *al-mal- al-mustafad* tidak dizakati sebelum sempurna satu tahun ditangan pemiliknya, kecuali apabila pemiliknya mempunyai harta sejenis yang pada permulaan tahun sudah mencapai satu nishab, maka *mal mustafad* dipungut zakatnya bersamaan.
- b. Imam Malik juga berpendapat bahwa *mal mustafad* tidak dizakati sebelum sempurna satu tahun baik pemilik mempunyai harta sejenis, mengecualikan tentang ternak.
- c. Menurut Syafi'i *mal mustafad* tidak dizakati sebelum setahun, meskipun pemilik mempunyai harta sejenis, kecuali anak ternaknya sendiri, maka *mal mustafad* yang merupakan anak ternaknya sendiri dizakati mengikuti induknya.
- d. Sedangkan pencetus zakat profesi Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa *mal mustafad* seperti gaji pegawai, upah buruh, penghasilan dokter, insinyur dan lain-lain serta penghasilan modal diluar perdagangan seperti armada (mobil), perahu, penerbangan, restoran, hotel dan tempat hiburan dan sebagainya, wajib dikenakan zakatnya dan tidak disyaratkan sampai setahun, akan tetapi dizakati pada saat penerimaan pendapatan atau penghasilan tersebut.

Muhammad Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf telah mengemukakan persoalan tentang zakat profesi dalam ceramahnya tentang zakat di Damaskus pada tahun 1952. Intinya adalah penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisab. Jika kita berpegang kepada pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bahwa nishab tidak perlu harus tercapai setahun, tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang ditengah-tengah kita dapat

¹²Ibid, h, 140-141.

menyimpulkan bahwa dengan penafsiran tersebut memungkinkan untuk wajib zakat atas hasil penghasilan setiap tahun, karena hasil itu jarang terhenti sepanjang tahun bahkan kebanyakan mencapai kedua sisi ujung tahun tersebut. Berdasarkan hal itu, kita dapat menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat, karena terdapatnya *illat* (penyebab), yang menurut ulama-ulama fikih sah, dan nisab yang merupakan landasan wajib zakat.

Tentang zakat profesi diambil dari penghasilan bruto (kotor) atau netto (bersih), juga masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada pendapat ulama yang mewajibkan zakat diambil dari pendapatan netto, yaitu pendapatan atau penghasilan yang telah dikurangi oleh kebutuhan pokok dan hutang jatuh tempo pada saat wajib zakat. Alasannya karena apabila diambil dari pendapatan bruto, bisa jadi masih ada kewajiban seperti membayar hutang yang akhirnya apabila hutangnya tersebut banyak, dia bisa jadi menjadi mustahiq, tidak lagi menjadi muzakki.

Perbedaan pendapat pun terjadi pula dalam persyaratan haul. Sementara itu, ulama fikih sepakat bahwa zakat tidak wajib dikeluarkan sebelum harta mencapai satu nishab. Dalam persyaratan haul ini, ada beberapa pendapat. *Pertama*, jumhur ulama menyatakan bahwa apabila harta itu telah mencapai satu nishab, maka boleh dikeluarkan zakatnya, sekalipun belum mencapai haul (satu tahun). Karena sebab wajib zakat itu telah terpenuhi yakni mencapai satu nisab. Sementara itu, ulama madzhab Syafi'i mengemukakan bahwa mendahulukan pembayaran zakat sebelum haul hanya diperbolehkan apabila harta itu tetap utuh satu nisab sampai akhir haul. *Kedua*, ulama madzhab Maliki dan az-Zahiri berpendapat bahwa tidak boleh membayarkan zakat sebelum haul. Oleh sebab itu pembayaran zakat sebelum haul hukumnya tidak sah. Perbedaan pendapat tentang haul ini termasuk pula didalamnya zakat profesi.

4. Waktu Pengeluaran Zakat Profesi

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada qiyas (analogi) yang dilakukan.

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok. *Kedua*, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5% dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan. *Ketiga*, jika dianalogikan pada zakat rikaz maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nishab dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

Penganalogian zakat profesi sesuai dengan qiyas syabah menetapkan kadar dan nishabnya dianalogikan dengan zakat pertanian karena ada kemiripan antara keduanya (*al-syabah*). Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terikat dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang, karena itu kadar zakatnya adalah sebesar *rub'ul usyri* atau 2,5%.

Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada '*urf*' (tradisi) disebuah negara. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter yang membuka praktek sendiri, atau para da'i yang setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan setiap bulan. Dan bagi karyawan yang setiap bulan menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan

zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan setiap panen, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-An'am : 141.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝١٤١﴾

Artinya : “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS.Al-An'am : 141).¹³

5. Sasaran Zakat Profesi

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama seperti pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai *maal al-mustafaad*. Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30

¹³Syu'aibun, *Zakat Profesi Menurut Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara*, (Bandung : Citapustaka Media, 2004), h, 42-52.

April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama yang menghasilkan pendapatan atau gaji.

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum seperti firman Allah SWT dalam surah Adz-Dzaariyaat : 19 ,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Pada nash ini mencakup semua harta yang halal, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW, maupun zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah SAW, baik yang sudah diketahui secara langsung maupun yang di qiyaskan kepadanya.

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan zakat atas harta benda yang mencapai nishab dan bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini untuk menetapkan siapa yang termasuk golongan orang kaya yang wajib zakat. Zakat hanya dibebankan kepada orang kaya tersebut.

Berdasarkan keterangan diatas, penghasilan yang mencapai nishab seperti gaji yang tinggi dan honorium yang besar dari para PNS, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan profesi wajib dikenakan zakat. Sehingga pada akhirnya, dengan adanya batasan nishab tersebut memungkinkan membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji kecil (belum mencapai nishab) dari kewajiban zakat dan membatasi

kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai yang mempunyai gaji tinggi saja (sudah mencapai nishab).

Oleh karenanya akan tercapai rasa keadilan dan kesamaan hak antar sesamanya serta terpenuhi tujuan syar'i dari zakat, yaitu kesejahteraan bagi orang yang tidak mampu (miskin). Lain halnya dengan Yusuf Qardlawi, yang juga termasuk sebagai ulama kontemporer dan seorang ahli fiqh kontekstual. Yusuf Qardlawi berpendapat dengan argumentasi bahwa orang yang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nishab gaji itu berdasarkan nishab uang. Oleh karenanya, berdasarkan pendapat Yusuf Qardlawi tersebut nishab dan persentase zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, emas dan perak senilai emas 85 gram dan kadarnya 2,5%.¹⁴

Adapun kelompok yang berhak mendapatkan penyaluran dana zakat (*mustahiq al-zakat*) setelah dikelola dengan baik oleh BAZNAS ada delapan mustahiq, yaitu sebagai berikut :

1. Orang fakir (Al-fuqara')

Al-fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima bagian dari zakat. Al-fuqara' adalah bentuk jamak dari kata al-faqir. Al-faqir menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

2. Orang miskin (Al-masaakin)

Al-masakin adalah bentuk jamak dari kata al-miskin. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin adalah orang

¹⁴Sjekhul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h, 140-146.

yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggalnya.

3. Panitia zakat (Al-‘amiil)

Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Yang boleh dikategorikan sebagai panitia zakat ialah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (al-‘asyir); penulis (al-katib); pembagi zakat untuk para mustahiqnya; penjaga harta yang dikumpulkan; al-hasyir yaitu orang yang ditugasi untuk mengumpulkan pemilik harta kekayaan/orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat; al-‘arif (orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban untuk zakat, tukar timbang, dan penggembala; dan setiap orang yang menjadi panitia selain ahli hukum (Islam) atau al-qadhi, dan penguasa, karena mereka tidak boleh mengambil dari bayt al-mal. Bagian yang diberikan kepada para amiil zakat dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya.

4. Muallaf

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat. Jumhur ulama dan sebagian pengikut mazhab Maliki berpendapat, keberadaan muallaf akan tetap sepanjang masa dan tidak terhapus (*mansukh*). Mereka harus diberi bagian dari zakat jika mereka memerlukan.

5. Hamba sahaya (Para budak)

Para budak yang dimaksudkan disini menurut jumhur ulama, ialah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk

dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka. Syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus Muslim dan memerlukan bantuan seperti itu. Namun karena pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan (sudah dilarang secara Internasional), bagian untuk mereka sudah tidak ada lagi.

6. Orang yang memiliki hutang

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang untuk dirinya sendiri maupun bukan, yakni hutang itu ia pergunakan untuk kepentingan orang banyak yang berada dibawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dibolehi diberi bagian dari zakat. Menurut Mazhab Hanafi orang yang berutang ialah orang yang betul-betul memiliki hutang dan tidak memiliki apa-apa selain hutangnya itu.

7. Fii sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah)

Yang termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak.

8. Musafir (orang yang sedang dalam perjalanan)

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan bai

(*tha'ah*) ini antara lain, ibadah haji, bepergian di jalan Allah dan ziarah yang dianjurkan.¹⁵

B. Kesiediaan Membayar Zakat Profesi

1. Pengertian Kesiediaan

Kesiediaan berarti suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kesiediaan juga berarti suatu kesanggupan (kerelaan) untuk berbuat sesuatu. Sedangkan menurut Slameto, kesiediaan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya sanggup untuk memberikan respon atau jawaban dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh atau kecenderungan untuk memberi respon.

Prinsip-prinsip kesiediaan menurut Slameto prinsip-prinsip kesiediaan meliputi :

- a. Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh mempengaruhi).
- b. Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dari pengalaman.
- c. Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiediaan.

Kesiediaan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan. Kesiediaan merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas. Pengaruh kondisi individual dapat merubah minat seseorang. Sehingga dikatakan kesiediaan sifatnya tidak stabil. Secara etimologi pengertian kesiediaan adalah perhatian, kecenderungan hati kepada sesuatu keinginan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan,

¹⁵Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*, h, 280-289.

pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.

Kesediaan merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap kesediaan akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur sebaik-baiknya. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa kesediaan adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selain itu kesediaan dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal. Kesediaan yang besar terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk membangkitkan semangat untuk melakukan tindakan yang diminati dalam hal ini membayar zakat.¹⁶

2. Faktor-Faktor Kesiadaan

Faktor-faktor kesediaan menurut Slameto mencakup 3 aspek :

- a. Kondisi fisik, mental dan emosional
- b. Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan
- c. Kepercayaan serta pengetahuan yang telah dipelajari.

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kesediaan Menurut Crow and Crow dalam bukunya Abdul Rahman Saleh berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya kesediaan, yaitu:

- a. Dorongan dari dalam diri individu.
- b. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan kesediaan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.

¹⁶Andi Mappiare, (*Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1997), h. 62.

- c. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.

Sedangkan menurut Nuckols dan Banducci dikutip oleh Elizabeth B. Hurlock menulis tentang fungsi kesediaan bagi kehidupan sebagai berikut:

- a. Kesediaan mempengaruhi intensitas cita-cita.
- b. Kesediaan sebagai tenaga pendorong yang kuat.
- c. Prestasi selalu dipengaruhi jenis dan intensitas kesediaan.
- d. Kesediaan yang terbentuk seumur hidup membawa kepuasan.

Ketidakpercayaan ataupun kurang percaya masyarakat terhadap lembaga amil zakat membuat sebagian masyarakat lebih memilih menunaikan ibadah zakat langsung kepada *mustahiq* zakat daripada ke lembaga zakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat oleh suatu lembaga amil zakat yang lebih profesional, amanah dan transparan akan dapat menumbuhkan semangat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut. Tingkat pemahaman masyarakat muslim mengenai keagamaan khususnya ibadah zakat berpengaruh kuat terhadap semua aspek kehidupan manusia, khususnya berdampak pada kesadaran masyarakat membayar zakat.

Termasuk ajaran Islam mengenai pemerataan dan pendistribusian pendapatan yang memihak kepada rakyat miskin. Pendapatan berpengaruh terhadap jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh *muzakki*. Dengan demikian, kepercayaan, tingkat religiusitas serta pendapatan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan perilaku masyarakat untuk menunaikan zakat di lembaga amil zakat. Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional akan menjadikan lembaga amil zakat tersebut sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat.¹⁷

¹⁷M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group, 2008), h, 15.

Indikator dari kesediaan menurut Slameto ialah :

- a. Kepercayaan, merupakan suatu sikap yang ditunjukkan oleh seseorang saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa apa yang ia yakini adalah benar.
- b. Kesanggupan, merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan perintah atasan dalam mencapai tujuan perusahaan.
- c. Kebutuhan, dimana seseorang merasa butuh saat ia bersedia melaksanakan kebijakan atau perintah seorang pemimpin.

C. Kebijakan Pimpinan

1. Kepemimpinan, kekuasaan dan wewenang

Kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama dibawah kepemimpinannya sebagai satu tim untuk mencapai tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin adalah unik dan tidak dapat diwariskan secara otomatis. Setiap pemimpin memiliki karakteristik tertentu yang timbul pada situasi berbeda.

Untuk dapat mengusahakan orang lain bekerja sama dengan dirinya maka pemimpin dapat menggunakan kewibawaan tertentu atau kewenangan formal tertentu. Kekuasaan merupakan suatu bagian dari sendi kehidupan organisasi. Kekuasaan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia. Dalam teori otoritas formal, dikatakan bahwa kewenangan adalah suatu kekuasaan atau hak pimpinan untuk bertindak dan memerintah orang lain atau bawahan.

Kekuasaan amat erat hubungannya dengan wewenang, namun kedua konsep ini harus dibedakan. Kekuasaan melibatkan kekuatan dan paksaan, wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang cakupannya lebih sempit. Wewenang adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh seseorang karena posisi yang dipegang dalam organisasi.

Unsur yang ada dalam wewenang adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang ditanamkan pada posisi seseorang. Seseorang mempunyai wewenang karena posisi yang didudukinya, bukan karena karakteristik pribadi yang dimilikinya.
- b. Wewenang diterima oleh bawahan. Individu pada posisi kedudukan sosialnya yang sah akan melaksanakan wewenangnya dan akan dipatuhi oleh bawahan karena dia memiliki hak yang sah.
- c. Wewenang digunakan secara vertikal. Wewenang mengalir dari atas ke bawah mengikuti hierarki kepemimpinan dalam organisasi.

2. Motivasi dan tindakan

Motivasi adalah proses memengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Motivasi sangat berkaitan dengan tindakan, sebab motif yang besar tidak efektif tanpa ada tindakan yang merupakan *follow-up* dari motif tersebut. Tindakan apapun merupakan salah satu jenis perbuatan manusia. Akan tetapi, perbuatan tersebut mengandung maksud tertentu yang memang dikehendaki oleh orang yang melakukan kegiatan itu. Paling sedikit ada dua macam perbuatan, yaitu :

- a. Pemikiran (*thinking*), yaitu perbuatan rohani yang menghendaki bekerjanya daya pikir (otak) manusia.
- b. Tindakan (*action*), yakni perbuatan jasmani yang amat membutuhkan gerak otot tubuh manusia. Perbuatan ini mengandung maksud tertentu yang memang dikehendaki oleh yang bersangkutan.¹⁸

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Rian Nugroho mengemukakan kebijakan yang bisa langsung diimplementasikan tanpa memerlukan kebijakan turunannya, seperti : Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan

¹⁸Sadili Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), h, 281-288.

Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll, dan Kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik penjelas seperti Undang-Undang dan PERDA.

Indikator dari implementasi kebijakan menurut Ripley ialah :

- a. Kepatuhan, dimana anggota wajib mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pimpinan. Seorang pemimpin memiliki kekuasaan dan wewenang untuk membuat kebijakan yang dianggap memiliki dampak positif terhadap perusahaan.
 - b. Kekuasaan, untuk dapat mengusahakan orang lain bekerja sama dengan dirinya maka pemimpin dapat menggunakan kewibawaan tertentu atau kewenangan formal tertentu. Kekuasaan merupakan suatu bagian dari sendi kehidupan organisasi. Kekuasaan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia.
 - c. Wewenang, setiap hubungan sosial dalam suatu organisasi akan melibatkan penggunaan kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan amat erat hubungannya dengan wewenang, namun kedua konsep ini harus dibedakan. Kekuasaan melibatkan kekuatan dan paksaan, wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang cakupannya lebih sempit. Wewenang adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh seseorang karena posisi yang dipegang dalam organisasi.
3. Kepemimpinan Dalam Islam
- a. Pengertian Pemimpin dan Kepemimpinan

Pemimpin ialah seseorang yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya, dan ciri-ciri kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keadaan, sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Manager (*Management Leader*) adalah seorang pemimpin dengan melaksanakan tugas berdasarkan prinsip dasar manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian sehingga mampu menciptakan keadaan orang lain yang dipimpinnya saling bekerja sama

untuk mencapai tujuan. Seorang pemimpin harus mempunyai kreativitas yang tinggi, untuk memimpin bawahannya.

Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat lain mengatakan kepemimpinan adalah keterampilan dan kemampuan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain, baik yang kedudukannya lebih tinggi maupun lebih rendah daripada nya dalam berfikir dan bertindak agar perilaku yang semula mungkin individualistik dan egosentrik berubah menjadi perilaku organisasional.¹⁹

b. Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam

Kepemimpinan itu wajib ada, baik secara syar'i ataupun secara 'aqli. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang sangat terkenal : “Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya”. Terdapat pula sebuah hadits yang menyatakan wajibnya menunjuk seorang pemimpin perjalanan diantara tiga orang yang melakukan suatu perjalanan.

Kepemimpinan adalah amanah, titipan Allah SWT, bukan sesuatu yang diminta apalagi dikejar dan diperebutkan. Sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, hendaknya semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, digunakan sebagai peluang untuk memperkaya diri, bertindak zalim dan sewenang-wenang.

¹⁹Ermaya Suradinata, *Psikologi Kepegawaian dan Peranan Pimpinan Dalam Motivasi Kerja*, (Bandung : CV Ramadan, 1995), h, 8-9.

Balasan dan upah seorang pemimpin sesungguhnya hanya dari Allah swt di akhirat kelak, bukan kekayaan dan kemewahan di dunia.

Kepemimpinan menuntut keadilan. Keadilan adalah lawan dari penganiayaan, penindasan dan pilih kasih. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak dan golongan. Diantara bentuknya adalah dengan mengambil keputusan yang adil antara dua pihak yang berselisih, mengurus dan melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang agama, etnis, budaya, dan latar belakang.

c. Kriteria Seorang Pemimpin Dalam Islam

Dalam Islam pemimpin disebut dengan Khalifah. Khalifah (Khaliifah adalah wakil, pengganti atau duta). Sedangkan secara istilah Khaliifah adalah orang yang bertugas menegakkan syariat Allah SWT, memimpin kaum muslimin untuk menyempurnakan penyebaran syariat Islam dan memberlakukan kepada seluruh kaum muslimin secara wajib, sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah SAW .

Dari pengertian diatas jelas bahwa pemimpin menurut pandangan Islam tidak hanya menjalankan roda pemerintahan begitu saja namun seorang pemimpin harus mewajibkan kepada rakyatnya untuk melaksanakan apa saja yang terdapat dalam syariat Islam walaupun bukan beragama Islam. Serta mempengaruhi rakyatnya untuk selalu mengikuti apa yang menjadi arahan dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat teladan Rasulullah SAW, yaitu :

- 1) *Shiddiq* (selalu berkata dan bersikap jujur dan benar). Bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga perbuatannya juga benar. Sejalan dengan ucapannya. *Shiddiq* sebagai modal dasar. Pertama-tama penyampai amanah harus punya sifat jujur, kalau tidak , maka dia gugur sebagai penyampai.

- 2) Amanah (dapat dipercaya) : Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak pernah menggunakan wewenang dan otoritasnya sebagai pemimpin untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan keluarganya,
- 3) *Fathonah* (cerdas dan bijaksana) : Seorang calon pemimpin haruslah memiliki kecerdasan, baik secara emosional (EQ), spiritual (SQ) maupun intelektual (IQ).
- 4) *Tabligh* (penyampai) dapat berkomunikasi dengan baik : artinya menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Walaupun kita masih memiliki sifat jelek, kita wajib menyampaikan kebenaran. Untuk menyampaikan ini tidak perlu kita harus suci terlebih dahulu.²⁰

D. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya. Sehingga pendapatan terbagi atas penghasilan, gaji/upah dan keuntungan.

Pendapatan pada dasarnya merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi atas pengorbanannya dalam proses produksi. Masing-masing faktor produksi seperti : tanah akan memperoleh balas jasa dalam bentuk sewa tanah, tenaga kerja akan memperoleh balas jasa berupa gaji/upah dan keahlian termasuk para *entrepreneur* akan memperoleh jasa dalam bentuk laba.

Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan upah merupakan kata lain dari gaji yang seringkali ditujukan kepada pegawai tertentu, biasanya pegawai bagian operasi.

²⁰Urip Santoso : <http://uripsantoso.wordpress.com/2010/08/30/meneladani-empat-sifat-rasulullah/>

Dilihat dari pemanfaatan tenaga kerja, pendapatan yang berasal dari balas jasa berupa upah atau gaji disebut pendapatan tenaga kerja (*labour income*), sedangkan pendapatan dari selain tenaga kerja disebut dengan pendapatan bukan tenaga kerja (*non labour income*). Dalam kenyataannya membedakan antara pendapatan tenaga kerja dan pendapatan bukan tenaga kerja tidaklah selalu mudah dilakukan. Ini disebabkan karena nilai output tertentu umumnya terjadi atas kerjasama dengan faktor produksi lain.

Oleh karena itu perhitungan pendapatan migran dipergunakan beberapa pendekatan yakni tergantung pada lapangan pekerjaannya. Untuk yang bekerja dan menerima balas jasa berupa upah atau gaji dipergunakan pendekatan pendapatan (*income approach*), bagi yang bekerja sebagai pedagang, pendapatannya dihitung dengan pendekatan produksi (*production approach*). Dengan demikian berdasarkan pendekatan diatas dalam pendapatan pekerja migran telah terkandung balas jasa untuk *skill* yang dimilikinya.

Ada beberapa alternatif penjelasan mengenai hubungan antara konsumsi dengan pendapatan. Apabila tingkat pendapatan meningkat maka konsumsi juga akan meningkat, tetapi dengan proporsi yang lebih kecil.

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk didalamnya gaji/upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.

Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzakki.

2. Unsur Pendapatan

Unsur pendapatan adalah *Quantity* pendapatan. *Quantity* pendapatan adalah jumlah semua penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi

kebutuhan pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan tetap dan pendapatan sampingan. Sumber pendapatan atau permintaan tiap-tiap orang sangatlah berbeda. Ada bermacam-macam sumber pendapatan, antara lain seorang pengusaha mendapatkan penghasilan dari laba usaha, pegawai negeri mendapatkan penghasilan berupa gaji, buruh pabrik mendapatkan penghasilan berupa upah, dan petani mendapatkan hasil dari panennya. Pendapatan yang mereka peroleh, akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam dan tidak terbatas jumlahnya. Akan tetapi yang menjadi masalah dalam pemenuhan kebutuhan adalah keterbatasan jumlah pendapatan yang mereka peroleh. Oleh karena itu banyaknya pendapatan sangat menentukan seseorang dapat menjadi Muzakki atau Mustahiq.

Indikator pendapatan menurut Flippo dan Dessler :

- a. Gaji / upah, gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan upah merupakan kata lain dari gaji yang seringkali ditujukan kepada pegawai tertentu, biasanya pegawai bagian operasi.
- b. Kompensasi, mengandung arti yang lebih luas daripada upah atau gaji. Upah atau gaji lebih menekankan pada balas jasa yang bersifat finansial, sedangkan kompensasi mencakup balas jasa finansial maupun non-finansial.

3. Pendapatan Menurut Islam

a. Pengertian dan Prinsip Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus (berkecukupan) diyakini sebagai kompensasi atas

kekayaannya dan di sisi lain merupakan insentif (perangsang) untuk kekayaan pihak defisit (berkekurangan). Titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat.

Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial.

Islam memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha, memiliki kekayaan dan mentransaksikannya. Dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti memperkenalkan hukum waris yang memberikan batas kekuasaan bagi pemilik harta dengan maksud membagi semua harta kekayaan kepada semua karib kerabat apabila seseorang meninggal dunia. Begitu pula dengan hukum zakat, infaq, sadaqah, dan bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi pendapatan dalam dunia perdagangan juga disyariatkan dalam bentuk akad kerja sama, misalnya distribusi dalam bentuk mudharabah merupakan bentuk distribusi kekayaan dengan sesama Muslim dalam bentuk investasi yang berorientasi profit sharing. Pihak pemodal yang mempunyai kelebihan harta membantu orang yang mempunyai keahlian berusaha, tetapi tidak punya modal.

Al-Quran berulang kali mengingatkan agar kamu Muslim tidak menyimpan dan menimbun kekayaan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka harus memenuhi kewajiban terhadap keluarga, tetangga, dan orang-orang harus mendapat bantuan. Menurut Yusuf Qaradhawi, distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek

dalam bentuk uang ataupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada instrument- instrumen produksi yaitu: 1. Upah, yaitu upah bagi paraa pekerja, dan sering kali dalam hal upah. 2. Bunga, yaitu Bunga sebagai imbalan dari uang modal (interest on capital) yang diharuskan pada pemilik proyek. 3. Sewa, yaitu ongkos untuk sewa tanah yang dipakai untuk proyek; dan 4. Keuntungan, yaitu keuntungan (profit) bagi pengelola yang menjalankan pengelolaan.

Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidak seimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip moral keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan prinsip moral tersebut. Juga kebebasan yang merupakan nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang Muslim dapat menjadi miliknya menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam Islam, legitimasi hak milik sangat terkait erat dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan. Hak milik pribadi diakui, dan hak kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, mewujudkan kepedulian sosial dan jihad fisabilillah. Ini berarti pengakuan hak kepemilikan dapat berperan sebagai pembebas manusia dari sikap matrealistis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan dalam perspektif Islam menjadikan nilai-nilai

moral sebagai faktor endogen, dan menjadikan nilai-nilai itu bersentuhan dengan hukum-hukum Allah.²¹

E. Pengetahuan Agama

1. Pengertian Pengetahuan

Secara etimologi pengetahuan atau berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu *knowledge*. Dalam *Encyclopedia of Philosophy* dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar (*knowledge is justified true belief*).

Sedangkan secara terminologi akan dikemukakan beberapa definisi tentang pengetahuan. Menurut Drs. Sidi Gazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam QS.Az Zumar ayat 9 Allah SWT. berfirman:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
أُولُو الْأَلْبَابِ

”Katakanlah (wahai Muhammad) apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui”. (QS. AZ – Zumar : 9).

Orang pragmatis, terutama John Dewey tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran (antara *knowledge* dengan *truth*). Jadi pengetahuan itu harus benar, kalau tidak benar adalah kontradiksi.²²

²¹Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zahra, 2008), h, 125-130.

²²Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),h, 85-86.

Jadi, penulis menarik kesimpulan tentang pengertian pengetahuan dalam penelitian ini adalah sesuatu yang diketahui, dimengerti dan dipahami tentang zakat profesi berdasarkan hasil belajar atau pengalaman seseorang tentang kewajiban seorang muslim membayar zakat profesi. Dalam penelitian ini mencakup apakah faktor pengetahuan berpengaruh terhadap penerapan zakat profesi Aparatur Sipil Negara Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan.

2. Dasar-Dasar Pengetahuan

a. Pengalaman

Semua bentuk penyelidikan ke arah pengetahuan mulai dengan pengalaman. Maka, hal pertama dan utama yang mendasari dan yang memungkinkan adanya pengetahuan adalah pengalaman. Pengalaman adalah keseluruhan peristiwa perjumpaan dan apa yang terjadi pada manusia dalam interaksinya dengan alam, diri sendiri, lingkungan sosial sekitarnya dan dengan seluruh kenyataan, termasuk Ilahi.

b. Ingatan

Selain pengalaman indrawi dan nindrawi, pengetahuan juga didasarkan atas ingatan. Dalam kedudukannya sebagai dasar pengetahuan, baik pengalaman indrawi maupun ingatan saling mengandaikan. Tanpa ingatan, pengalaman indrawi tidak akan dapat berkembang menjadi pengetahuan. Pada lain pihak, ingatan mengandaikan pengalaman indrawi sebagai sumber dan dasar rujukannya. Kita hanya dapat mengingat apa yang sebelumnya pernah kita alami secara indrawi, entah secara langsung atau tidak langsung. Kendati ingatan sering kali menjadi kabur dan tidak tepat, atau dengan kata lain dapat keliru, namun dalam kehidupan sehari-hari, baik secara teoritis maupun praktis, pengetahuan kita dasarkan atas ingatan.

Dalam mengingat, kita dapat mengingats suatu kecakapan praktis yang pernah kita pelajari sebelumnya, atau suatu peristiwa, fakta atau kejadian masa lalu. Kita juga dapat mengingat hal-hal tertentu yang sudah kita ketahui sebelumnya.

Dan menurut penulis sendiri salah satu cara efektif untuk mengingat ilmu atau pengetahuan yang sudah kita pelajari adalah dengan mengajarkannya kepada orang lain, agar ilmu/pengetahuan menjadi lebih bermanfaat untuk orang lain.

c. Minat dan Rasa Ingin Tahu

Tidak semua pengalaman berkembang menjadi pengetahuan. Untuk dapat berkembang menjadi pengetahuan, subjek yang mengalami sesuatu perlu memiliki minat dan rasa ingin tahu tentang apa yang dialaminya. Maka, hal lain yang mendasari adanya pengetahuan adalah adanya minat dan rasa ingin tahu manusia. Minat mengarahkan perhatian terhadap hal-hal yang dialami dan dianggap penting untuk diperhatikan. Ini berarti bahwa dalam kegiatan mengetahui sebenarnya selalu sudah termuat unsur penilaian. Orang akan diminati apa yang ia pandang bernilai. Sedangkan rasa ingin tahu mendorong orang untuk bertanya dan melakukan penyelidikan atas apa yang dialami dan menarik minatnya.

Mengajukan pertanyaan yang tepat merupakan langkah pertama memperoleh jawaban yang benar. Hanya kalau orang menyadari akan ketidaktahuannya dan ingin tahu, maka ia akan bertanya dan berusaha mencari jawaban atas apa yang ia tanyakan. Kesadaran dan dorongan seperti itu merupakan hal yang mendasar bagi bertambahnya pengetahuan. Hanya kalau orang berusaha untuk dapat memahami dan menjelaskan apa yang dialami, maka pengalaman dapat berkembang menjadi pengetahuan.

d. Kebutuhan Hidup Manusia

Dalam interaksinya dengan dunia dan lingkungan sosial sekitarnya manusia membutuhkan pengetahuan. Maka kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan juga merupakan suatu faktor yang mendasari dan mendorong berkembangnya pengetahuan manusia. Memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk dapat hidup merupakan suatu bagian dari cara berada manusia.²³

²³J. Sudarminta, *Epistomologi Dasar*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h, 32-44.

3. Jenis Pengetahuan

Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada empat, yaitu:

a. Pengetahuan Biasa

Yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah *common sense*, dan sering diartikan dengan *good sense*, karena seseorang memiliki sesuatu dimana ia menerima secara baik.

Dengan *common sense*, semua orang sampai pada keyakinan secara umum tentang sesuatu, dimana mereka akan berpendapat sama semuanya. *Common sense* diperoleh dari pengalaman sehari-hari.

b. Pengetahuan Ilmu

Yakni ilmu sebagai terjemahan dari *science*. Dalam pengertian yang sempit *science* diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam, yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan *common sense*, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode.

c. Pengetahuan Filsafat

Yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu.

d. Pengetahuan Agama

Yakni pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusan-Nya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan mengandung beberapa hal pokok, yaitu ajaran tentang agama, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan, yang sering juga disebut dengan hubungan vertikal dan cara berhubungan dengan sesama manusia, yang sering juga disebut dengan hubungan horizontal. Pengetahuan agama yang lebih penting disamping informasi tentang Tuhan, juga informasi tentang Hari Akhir. Iman kepada

Hari Akhir merupakan ajaran yang membuat manusia optimis akan masa depannya.²⁴

Indikator pengetahuan menurut C.Y. Glock dan R. Stark :

- a. Pengalaman, hal pertama dan utama yang mendasari dan yang memungkinkan adanya pengetahuan adalah pengalaman. Pengalaman adalah keseluruhan peristiwa perjumpaan dan apa yang terjadi pada manusia dalam interaksinya dengan alam, diri sendiri, lingkungan sosial sekitarnya dan dengan seluruh kenyataan, termasuk Ilahi.
- b. Pemahaman, merupakan kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterima.
- c. Minat dan rasa ingin tahu, hal lain yang mendasari adanya pengetahuan adalah adanya minat dan rasa ingin tahu manusia. Minat mengarahkan perhatian terhadap hal-hal yang dialami dan dianggap penting untuk diperhatikan. Ini berarti bahwa dalam kegiatan mengetahui sebenarnya selalu sudah termuat unsur penilaian. Orang akan diminati apa yang ia pandang bernilai. Sedangkan rasa ingin tahu mendorong orang untuk bertanya dan melakukan penyelidikan atas apa yang dialami dan menarik minatnya.

F. Kajian Terdahulu

Tabel 2.1

Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil
Windawati (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi pegawai negeri sipil (PNS) membayar zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bogor.	Metode penelitian yang digunakan adalah regresi logistik.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa estimasi jumlah potensi zakat profesi yang dihasilkan oleh PNS Kabupaten Bogor sebesar Rp.1.536.293.318 perbulan. Variabel yang signifikan mempengaruhi preferensi PNS Kabupaten Bogor membayar zakat profesi adalah jenis kelamin,

²⁴ Bakhtiar, *Filsafat...*, h, 86-110.

			golongan pekerjaan, besar tunjangan, instruksi Bupati, himbauan pimpinan dan pengetahuan.
Endarti Nurwiyan (2009)	Urgensi komunikasi hukum terhadap pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Temanggung.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan pendekatan sosiologi melalui observasi partisipatif dan wawancara.	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa komunikasi hukum yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Temanggung menggunakan metode pelatihan, ceramah umum, penyebaran leaflet, pemberian intruksi oleh bupati, pemberitaan lewat radio dan media cetak dan melalui surat-surat dengan sasaran pegawai. Untuk menumbuhkan kesadaran pegawai untuk mengeluarkan zakat profesi, serta pengelolaan BAZ yang tertib, akuntabel dan transparan di bentuklah 39 UPZ (unit pengumpul zakat) yang akuntabel dan transparan. Model ideal komunikasi hukum zakat profesi di Kabupaten Temanggung dengan melalui sosialisasi intensif, pendekatan kepada tokoh agama untuk pelaksanaan zakat profesi, serta intruksi Bupati Kabupaten Temanggung kepada SKPD-SKPD merupakan strategi yang paling baik untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat profesi masyarakat Kabupaten Temanggung.
Anindita Dianingtyas (2011)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan karyawan	Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karyawan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyimpan potensi dana

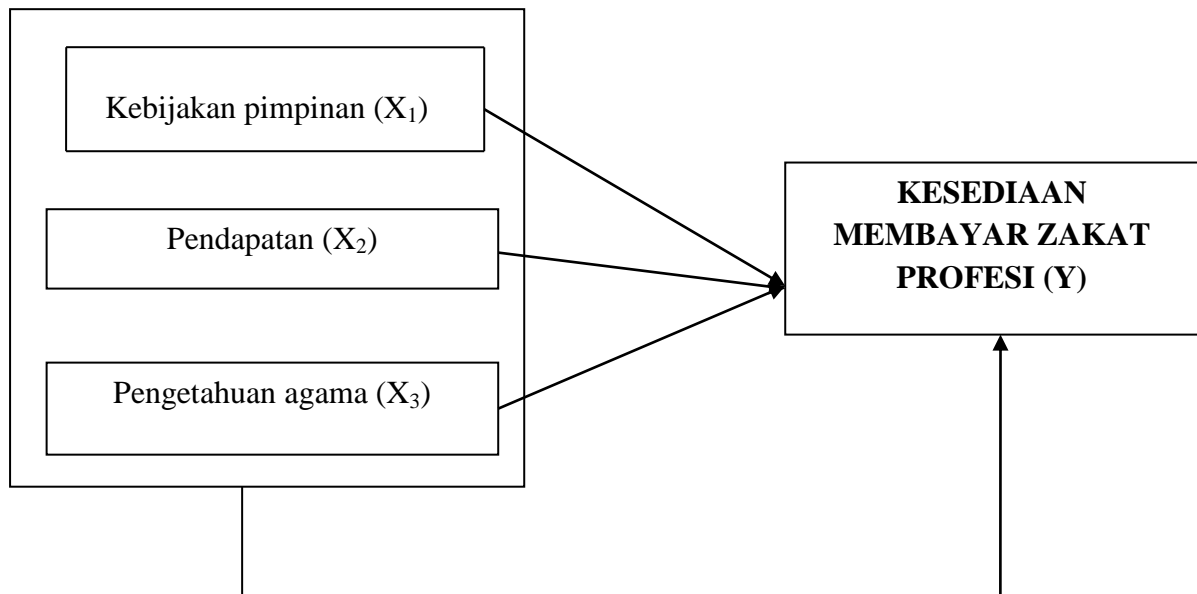
	membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji (studi kasus Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia).	menggunakan program olah data SPSS Versi 12.	zakat profesi yang cukup besar, oleh karena itu pemerintah perlu menggali potensi zakat ini dan memaksimalkannya. Umur, pendidikan, pendapatan, pengetahuan agama dan kepercayaan kepada LAZ secara signifikan mempengaruhi kesediaan karyawan Direktorat Jenderal Perbendaharaan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji. Sedangkan variabel status pernikahan tidak signifikan mempengaruhi kesediaan karyawan Direktorat Jenderal Perbendaharaan membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.
--	--	--	--

Penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini lebih menfokuskan kepada pengaruh apa saja yang menjadi alasan diterapkannya penerapan zakat profesi pegawai ASN di kalangan SKPD Kota Medan. Penelitian ini ditujukan di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan yang menjadi salah satu dari 4 SKPD Kota Medan yang menerapkan zakat profesi pegawainya melalui potongan gaji setiap bulan.

G. Kerangka Teoritis

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Oleh karena itu penelitian yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih, biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan.

Gambar 2.1
Kerangka Teoritis



Dari kerangka tersebut memiliki makna bahwa kebijakan pimpinan mempengaruhi kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi melalui potongan gaji, begitu juga pendapatan dan pengetahuan agama memiliki pengaruh terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi.

H. Hipotesa

Hipotesa adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya sehingga masih harus diuji menggunakan teknik tertentu. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka hipotesis kerja yang ditetapkan dalam penelitian adalah :

H_{01} : Kebijakan pimpinan tidak berpengaruh terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

H_{a1} : Kebijakan pimpinan berpengaruh terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

$H_{0\ 2}$: Pendapatan tidak berpengaruh terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

$H_{a\ 2}$: Pendapatan berpengaruh terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

$H_{0\ 3}$: Pengetahuan agama tidak berpengaruh terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

$H_{a\ 3}$: Pengetahuan agama berpengaruh terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

$H_{0\ 3}$: Kebijakan pimpinan, pendapatan dan pengetahuan agama tidak berpengaruh terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

$H_{a\ 3}$: Kebijakan pimpinan, pendapatan dan pengetahuan agama berpengaruh terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi secara langsung melalui pemotongan gaji.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berhubungan dengan judul yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan perhitungan angka-angka yang kemudian dianalisis dengan statistik. Penelitian ini merupakan jenis pengambilan data yang bersifat deskriptif kuantitatif terhadap masalah yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai muslim ASN di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan pimpinan, pendapatan dan pengetahuan agama terhadap kesediaan pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Pemerintah Kota Medan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan di Jl. Budi Pembangunan No. 3 Pulo Brayan Medan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada Bendahara Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan yang dilakukan mulai 02 November hingga 02 Desember 2018.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian *expost facto*. Desain *expost facto* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji apa yang telah terjadi. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data mentah yang diperoleh oleh peneliti sendiri dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.¹

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan.² Dari hasil wawancara dengan bendahara Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kotan Medan, pegawai aparatur sipil negara (ASN) muslim di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kotan Medan yaitu berjumlah 33 orang, sehingga populasi dalam penelitian ini adalah 33 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut.³ Adapun teknik sampel yang digunakan adalah metode sampel jenuh. Sampel Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik ini dapat dipergunakan bilamana jumlah unit sampling di dalam suatu populasi itu tidak terlalu besar.⁴

Sedangkan di dalam penelitian penulis menggunakan penentuan sampel yang ditetapkan oleh Suharsimi Arikunto menetapkan jika populasi di bawah 100 maka semua populasi diambil dijadikan sebagai sampel, namun apabila populasi di atas 100 maka sampel yang diambil adalah 10-

¹Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013), h, 66.

²Indra Jaya, *Penerapan Statistik Untuk Pendidik*, (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2013), h, 20.

³Arfan Ikhsan dan Misri, *Metodologi Penelitian untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h, 142.

⁴Syahrum & Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Citapustaka Media, 2013), h, 116.

15 % atau 20-25% dan populasi dari populasi yang ada.⁵ Dengan demikian peneliti memutuskan bahwa yang menjadi sampel dalam ini adalah keseluruhan dari populasi yang berjumlah 33 orang pegawai ASN muslim Kantor Dinas Katahanan Pangan Kota Medan.

E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah suatu defenisi yang dinyatakan dalam bentuk istilah yang diuji secara spesifik atau dengan pengukuran kinerja.

1. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen.⁶

a. Kebijakan Pimpinan (X_1)

Kebijakan merupakan suatu intruksi maupun serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah.

Indikator implementasi kebijakan menurut Ripley :

- 1) Kepatuhan
- 2) Kekuasaan
- 3) Wewenang

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Penilaian Kebijakan Pimpinan

Variabel	Indikator	Butir Soal	Jumlah Soal
Kebijakan pimpinan	1. Kepatuhan	1 – 5	5
	2. Kekuasaan	6 - 10	5
	3. wewenang	11 - 15	5
Jumlah			15

Sumber soal : penelitian terdahulu dan referensi

⁵Arikunto, Suharsimi, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h,50.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,h, 61.

b. Pendapatan (X_2)

Pendapatan adalah hasil yang diterima dari setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang /lembaga. Bentuknya bisa berbentuk gaji, upah, honor, persen dan sebagainya.

Indikator pendapatan menurut Dessler :

- 1) Upah / gaji
- 2) Kompensasi

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Penilaian Pendapatan

Variabel	Indikator	Butir Soal	Jumlah Soal
Pendapatan	1. Gaji / upah	1 - 8	8
	2. Kompensasi	9 - 15	7
Jumlah			15

Sumber soal : penelitian terdahulu dan referensi

c. Pengetahuan Agama (X_3)

Pengetahuan dalam penelitian ini adalah sesuatu yang diketahui, dimengerti dan dipahami tentang zakat profesi berdasarkan hasil belajar atau pengalaman seseorang tentang kewajiban seorang muslim membayar zakat profesi.

Indikator pengetahuan menurut C.Y. Glock dan R. Stark ialah :

- 1) Pemahaman
- 2) Pengalaman
- 3) Minat dan rasa ingin tahu

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Penilaian Pengetahuan Agama

Variabel	Indikator	Butir Soal	Jumlah Soal
Pengetahuan Agama	1. Pemahaman	1 - 5	5
	2. Pengalaman	6 - 10	5
	3. Minat	11 - 15	5
Jumlah			15

Sumber soal : penelitian terdahulu dan referensi

2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.⁷ Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesediaan pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji. Dimana kesediaan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya sanggup untuk memberikan respon atau jawaban dalam cara tertentu terhadap suatu situasi.

Indikator dari kesediaan menurut Slameto ialah :

- a. Kesanggupan
- b. Kebutuhan
- c. Kepercayaan

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Penilaian Kesediaan Membayar Zakat Profesi

Variabel	Indikator	Butir soal	Jumlah soal
Kesediaan Membayar Zakat Profesi	1. Kesanggupan	1 - 5	5
	2. Kebutuhan	6 - 10	5
	3. Kepercayaan	10 - 15	5
Jumlah			15

Sumber soal : penelitian terdahulu dan referensi

⁷Ibid. h, 61.

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan

Berbagai data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai metode, yaitu:

1. Studi Pustaka

Di dalam pengumpulan data studi pustaka penulis memperoleh data-data dari buku, serta bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan judul penelitian.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

3. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Angket yang di gunakan adalah jenis Angket Tertutup. Angket tertutup, yaitu pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternative jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang telah dikumpul dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu.⁸ Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data

⁸ Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*, h. 88.

sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil.⁹

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti apakah kebijakan pimpinan, pendapatan, dan pengetahuan agama berpengaruh terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi melalui potongan gaji dengan menggunakan aplikasi SPSS 20 (*Statistik Product and Service Solutions*).

Analisis data yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Uji Kualitas Data

- a. Uji Validitas, Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrument sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid/ benar maka hasil pengukuran pun kemungkinan akan benar.¹⁰ Uji validitas product moment pearson correlation menggunakan prinsip mengkorelasikan atau menghubungkan antara masing-masing skor item atau soal dengan skor total yang diperoleh dari jawaban responden atas kuisioner. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji ini, bisa dilakukan melalui beberapa cara, namun pada penelitian ini penulis menggunakan cara membandingkan nilai sig (2-tailed) dengan probabilitas 0,05 yaitu :

- 1) Jika nilai sig (2-tailed) < 0,05 dan pearson correlation bernilai positif maka item soal angket tersebut valid.
- 2) Jika nilai sig (2-tailed) > 0,05 dan pearson correlation bernilai negatif maka item soal angket tersebut tidak valid.¹¹

- b. Uji Reliabilitas, Realibitas memiliki berbagai nama lain seperti keterpercayaan, kehandalan, dan kestabilan. Tujuan pengujian

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h, 207-208.

¹⁰Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*,...h, 79.

¹¹C. Trihendradi. *7 Langkah Mudah Melakukan Analisis Statistik* (Yogyakarta: Andi, 2009), h, 77.

reliabilitas adalah untuk melihat apakah instrument penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya.¹² Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini penulis menggunakan uji reliabilitas Alpha Cronbach's. Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah :

- 1) Jika nilai Alpha Cronbach's $> r_{\text{tabel}}$ maka item yang digunakan dinyatakan reliabel atau konsisten.
- 2) Jika nilai Alpha Cronbach's $< r_{\text{tabel}}$ maka item yang digunakan dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistic parametris. Penggunaan statistic parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Oleh karena itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian normalitas data.¹³

Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data adalah :

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

¹²*Ibid*, h, 83.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,...h, 171-172.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabelin dependen. Jika variable independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel orthogonal adalah variable independen yang nilai korelasi antar sesama variable independen sama dengan nol.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Ada beberapa jenis uji heteroskedastisitas, dalam penelitian ini jenis uji heteroskedastisitas yang digunakan adalah Uji Heteroskedastisitas Glejser. Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas glejser, yaitu:

- 1) Jika nilai sig > 0,05 pada tabel coefficients, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3. Regresi Berganda

Regresi berganda digunakan jika terdapat lebih dari satu buah variable independen dan hanya ada satu buah variable dependen. Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi perubahan nilai variabel dependen akibat pengaruh dari nilai variabelin dependen.¹⁴Persamaan regresi berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Y = Variabel dependen

a = Konstanta

$b_1b_2b_3$ = Koefisien regresi

X_1 = Kebijakan pimpinan

¹⁴AzuarJuliandidanIrfan, *MetodologiPenelitianKuantitatifuntukIlmu-IlmuBisnis*,...h. 164.

X_2 = pendapatan

X_3 = Pengetahuan agama

e = Error

4. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variable independen terhadap variable dependen maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan pada penelitian ini. Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, dilakukan dengan pengujian secara parsial menggunakan uji t, serta pengujian koefisien determinasi (R^2).

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah ukuran (besaran) untuk menyatakan tingkat kekuatan hubungan dalam bentuk persen (%). Besaran ini dinyatakan dengan notasi R .¹⁵ Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variable dependen.

b. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variable independen yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama atau simultan dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- 2) Sebaliknya, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

c. Uji t (Parsial)

Uji t (parsial) yaitu untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan nilai t hitung dan nilai kritis sesuai dengan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05.

¹⁵Andi Supangat, *Statistika dalam Pengkajian Deskriptif, Inferensidan Non-Parametrik*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h, 341.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Pada bagian ini dibahas dan dipaparkan data yang terkumpul dari hasil penelitian yang meliputi: 1. Deskripsi data variabel terikat yaitu Kesiediaan Pegawai ASN Membayar Zakat Profesi (Y), serta kedua variabel bebas yaitu Kebijakan Pimpinan (X_1), Pendapatan (X_2) dan Pengetahuan Agama (X_3), 2. Pengujian persyaratan analisis meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi berganda dan uji hipotesis. Berikut ini dipaparkan satu persatu.

B. Deskripsi Tempat Penelitian

Profil Badan Ketahanan Pangan Kota Medan :

1. Nama unit kerja : Badan Ketahanan Pangan Kota Medan
Nama pejabat : Muslim,S.Sos,M.SP
2. Alamat / telp kantor : Jln. Budi Pembangunan No.3 Pulo Brayan Medan,
telp.6614224.
3. Dasar hukum
 - a. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 - b. Peraturan Daerah Kota Medan No.3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
 - c. Peraturan Walikota Medan No.9 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Kota Medan .
 - d. Surat Keputusan Walikota Medan No.22 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan.
4. Tugas pokok
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah bidang ketahanan pangan.

5. Fungsi

a. Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan.
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

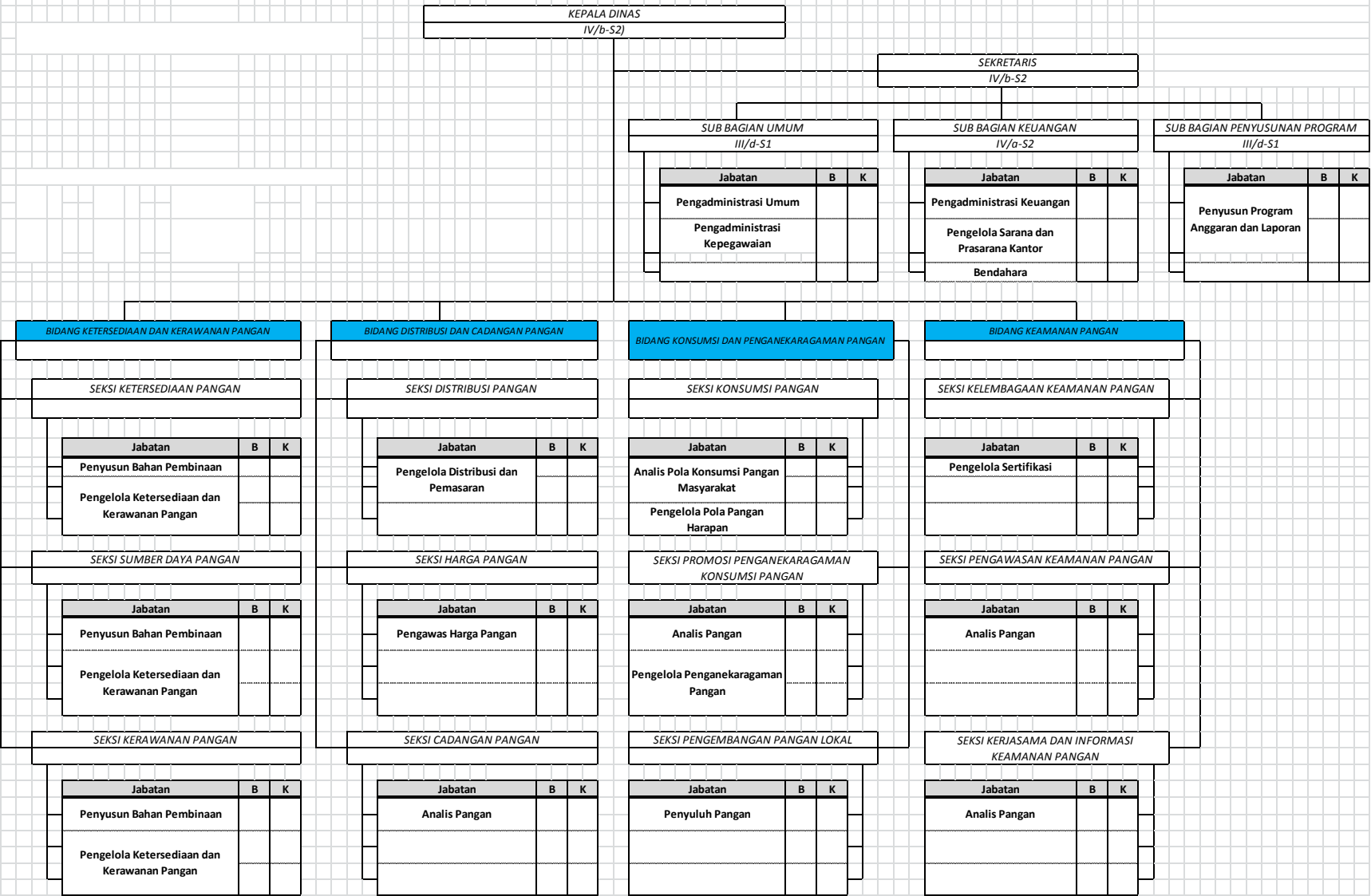
b. Bidang

- 1) Bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- 2) Bidang distribusi dan akses pangan.
- 3) Bidang konsumsi, mutu, dan keamanan pangan.

6. Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan

Penenangan ketahanan pangan secara komprehensif dan terkoordinasi dengan skpd/instansi terkait dalam kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan melalui sidang/rapat koordinasi minimal 2 kali setahun dan rapat posko yang dilaksanakan setiap bulannya. Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Medan.

PETA JABATAN DINAS KETAHANAN PANGAN



C. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan sampel dari penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepada pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan pengelolaan data dalam bentuk kuisioner yang terdiri dari 15 pernyataan variabel X_1 (kebijakan pimpinan), 15 pernyataan variabel X_2 (pendapatan), 15 pernyataan variabel X_3 (pengetahuan agama), dan 15 pernyataan variabel Y_1 (kesediaan membayar zakat profesi) yang disebarakan kepada 33 responden dengan menggunakan Skala Likert.

Tabel 4.1

Pengukuran Skala Likert

No	Penyataan	Skor
1	SS = Sangat Setuju	4
2	S = Setuju	3
3	TS = Tidak Setuju	2
4	STS = Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

1. Karakteristik responden

Dibawah ini peneliti akan menguraikan penyajian data dalam berbagai karakteristik :

- a. Penyajian data berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.2

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	17 Orang	51,5%
2	Perempuan	16 Orang	48,5%
Total		33 Orang	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Dari tabel identifikasi responden diatas dapat dijelaskan bahwa dari 33 responden yang diteliti, sebanyak 51,5% atau sebanyak 17 orang adalah laki-laki, dan sisanya 48,5% atau sebanyak 16 orang adalah perempuan.

b. Penyajian Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.3

Identifikasi Responden Berdasarkan Usia

No	Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase
1	30-40 tahun	13	39,4%
2	40-50 tahun	19	57,6%
3	> 50 tahun	1	3,0%
Total		33	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden yang paling banyak adalah responden yang berusia 40-50 tahun berjumlah 19 responden (57,6%), responden yang berusia 30-40 tahun berjumlah 13 responden (39,4%), responden yang berusia > 50 tahun berjumlah 1 responden (3,0%).

c. Penyajian Responden Berdasarkan Pendapatan

Tabel 4.4

Identifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan

No	Pendapatan	Jumlah	Persentase
1	Rp. 2.000.000 - 4.000.000	21	63,6%
2	Rp. 4.000.000 - 6.000.000	10	30,3%
3	Rp. 6.000.000 - 8.000.000	2	6,1%
Total		33	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah responden dengan pendapatan Rp. 2.000.000 - 4.000.000 berjumlah 21 responden (63,6%),

pendapatan Rp. 4.000.000 - 6.000.000 berjumlah 10 responden (30,3%), dan pendapatan Rp. 6.000.000 - 8.000.000 berjumlah 2 responden (6,1%).

2. Deskripsi Variabel

a. Kebijakan Pimpinan (X_1)

Dalam hal ini dikemukakan angket mengenai Kebijakan Pimpinan yang merupakan variabel bebas dari penelitian, sebagaimana terlihat pada gambar tabel 4.5 hasil presentase jawaban responden berdasarkan Kebijakan Pimpinan (X_1).

Tabel 4.5
Responden Terhadap Kebijakan Pimpinan (X_1)

Item Pertanyaan	Skor Jawaban Responden							
	SS		S		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%
1	0	0%	29	87,8%	4	12,2%	0	0%
2	5	15,1%	28	84,9%	0	0%	0	0%
3	14	42,4%	18	54,6%	0	0%	1	3%
4	0	0%	29	87,8%	4	12%	0	0%
5	1	3%	30	91%	2	6%	0	0%
6	15	45%	17	52%	1	3%	0	0%
7	4	12%	27	82%	2	6%	0	0%
8	2	6%	30	91%	1	3%	0	0%
9	16	48,5%	16	48,5%	1	3%	0	0%
10	4	12%	29	87,8%	0	0%	0	0%
11	17	51,5%	16	48,5%	0	0%	0	0%
12	14	42,4%	19	57,6%	0	0%	0	0%
13	4	12%	29	87,8%	0	0%	0	0%
14	19	57,6%	14	42,4%	0	0%	0	0%
15	18	54,6%	15	45,4%	0	0%	0	0%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan beberapa pernyataan, yaitu :

- 1) Butir pernyataan 1 mengenai pegawai membayar zakat profesi karena mengikuti kebijakan dari pimpinan kantor setelah adanya himbauan dari BAZNAS. Mayoritas responden menjawab setuju 29 responden dengan persentase 87,8%.

- 2) Butir pernyataan 2 mengenai pegawai sangat mendukung kebijakan pimpinan dalam menerapkan zakat profesi melalui potongan gaji karena membantu pegawai melaksanakan salah satu rukun Islam. Mayoritas responden menjawab setuju 28 responden dengan persentase 84,9%.
- 3) Butir pernyataan 3 mengenai pegawai ikut membayar zakat profesi karena pimpinan juga ikut melaksanakannya. Responden menjawab setuju 18 orang (54,6%) dan sangat setuju 14 orang (42,4%).
- 4) Butir pernyataan 4 mengenai setuju dengan kebijakan pimpinan atas potongan gaji setiap bulan untuk zakat profesi karena profesi ASN merupakan profesi yang berpotensi besar untuk dikeluarkan zakat atas pendapatannya. Mayoritas responden menjawab setuju 29 responden dengan persentase 87,8%.
- 5) Butir pernyataan 5 mengenai pegawai membayar zakat profesi dengan sepenuh hati walaupun karena adanya kebijakan dan dukungan pimpinan atas himbauan dari BAZNAS Kota Medan. Mayoritas responden menjawab setuju 30 responden dengan persentase 91%.
- 6) Butir pernyataan 6 mengenai Kebijakan pimpinan sangat berpengaruh terhadap di terapkannya zakat profesi melalui potongan gaji setiap bulannya di Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan. Responden menjawab setuju 17 orang (52%) dan sangat setuju 15 orang (45%).
- 7) Butir pernyataan 7 mengenai Penerapan zakat profesi sebaiknya di terapkan di seluruh kantor sehingga seluruh pegawai muslim menunaikan zakat profesinya. Responden menjawab setuju 27 responden (82%) dan sangat setuju 4 responden (12%).
- 8) Butir pernyataan 8 mengenai pegawai merasa pimpinan kantor mampu menempatkan kekuasaan yang dimiliki pada kebijakan

yang baik dan bermanfaat bagi pegawainya. Mayoritas responden menjawab setuju 30 responden dengan persentase 91%.

- 9) Butir pernyataan 9 mengenai pegawai salut dengan gaya kepemimpinan pemimpin kantor yang mampu mengayomi bawahannya dengan kekuasaan yang dimilikinya. Responden menjawab setuju 16 orang (48,5%) dan sangat setuju 16 orang (48,5%).
- 10) Butir pernyataan 10 mengenai Pemimpin kantor mampu menumbuhkan kesadarannya tentang pentingnya menempatkan kekuasaan dengan baik dan benar. Mayoritas responden menjawab setuju 29 responden dengan persentase 87,8%.
- 11) Butir pernyataan 11 mengenai Pimpinan memiliki wewenang untuk menerapkan kebijakan yang baik. Responden menjawab setuju 16 orang (48,5%) dan sangat setuju 17 orang (51,5%).
- 12) Butir pernyataan 12 mengenai pegawai merasa pimpinan kantor sangat amanah dalam menjalankan wewenangnya dengan ikut membantu melaksanakan himbauan dari BAZNAS untuk membayar zakat profesi melalui potongan gaji setiap bulannya. Responden menjawab setuju 19 orang (57,6%) dan sangat setuju 14 orang (42,4%).
- 13) Butir pernyataan 13 mengenai pegawai sangat mendukung segala wewenang yang diterapkan pimpinan dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Mayoritas responden menjawab setuju 29 responden dengan persentase 87,8%.
- 14) Butir pernyataan 14 mengenai pegawai berpendapat bahwa pimpinan sangat bertanggung jawab atas wewenang yang dibuat dengan ikut serta membayar zakat profesi melalui potongan gaji. Responden menjawab setuju 14 orang (42,4%) dan sangat setuju 19 orang (57,6%).
- 15) Butir pernyataan 15 mengenai Kebijakan yang diterapkan oleh pemimpin dapat mempengaruhi personal pemimpin itu sendiri.

Responden menjawab setuju 15 orang (45,4%) dan sangat setuju 18 orang (54,6%).

Berdasarkan hasil jawaban responden, variabel kebijakan pimpinan dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan pernyataan yang diajukan kepada pegawai ASN didapatkan jawaban, sebagian besar pegawai menyatakan setuju. Hal ini dapat diartikan bahwa kebijakan pimpinan berpengaruh terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji.

Tabel 4.6
Responden Terhadap Pendapatan (X₂)

Item Pertanyaan	Skor Jawaban Responden							
	SS		S		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%
1	1	3%	29	87,8%	0	0%	0	0%
2	4	12,2%	29	87,8%	0	0%	0	0%
3	17	51.6%	15	45,4%	1	3%	0	0%
4	5	15,1%	28	84,9%	0	0%	0	0%
5	17	51.5%	16	48,5%	0	0%	0	0%
6	17	51.6%	15	45,4%	1	3%	0	0%
7	15	45,4%	17	51.6%	1	3%	0	0%
8	15	45,4%	18	54,6%	0	0%	0	0%
9	3	9,2%	29	87,8%	1	3%	0	0%
10	13	39,4%	19	57,6%	1	3%	0	0%
11	17	51.5%	16	48,5%	0	0%	0	0%
12	14	42,4%	18	54,6%	1	3%	0	0%
13	16	48,5%	16	48,5%	1	3%	1	3%
14	13	39,4%	19	57,6%	0	0%	0	0%
15	19	57,6%	14	42,4%	0	0%	0	0%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan beberapa pernyataan, yaitu :

- 1) Butir pernyataan 1 mengenai Muzakki menunaikan zakat karena dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Mayoritas responden menjawab setuju 29 responden dengan persentase 87,8%.
- 2) Butir pernyataan 2 mengenai pegawai akan berzakat jika pendapatan saya sampai pada nishabnya walaupun dengan tidak adanya tunjangan

gaji pokok. Mayoritas menjawab setuju 29 responden dengan persentase 87,8%.

- 3) Butir pernyataan 3 mengenai Zakat tidak mengurangi hasil pendapatan saya untuk kebutuhan sehari-hari. Responden menjawab setuju 15 orang (45,4%) dan sangat setuju 17 orang (51,6%).
- 4) Butir pernyataan 4 mengenai pegawai yakin dengan berzakat pendapatan saya akan semakin berkah dan lancar. Mayoritas menjawab setuju 28 responden dengan persentase 84,9%.
- 5) Butir pernyataan 5 mengenai dengan meningkatnya pendapatan perkapita maka jumlah orang yang membayar zakat meningkat, dan zakat nantinya akan merubah penerima dari kondisi mustahik menjadi muzakki. Responden menjawab setuju 16 orang (48,5%) dan sangat setuju 17 orang (51,6%).
- 6) Butir pernyataan 6 mengenai Muzakki membayar zakat profesi dari gaji yang diperoleh bertujuan untuk membersihkan harta setiap bulannya. Responden menjawab setuju 15 orang (45,4%) dan sangat setuju 17 orang (51,6%).
- 7) Butir pernyataan 7 mengenai zakat profesi layak dikeluarkan seorang pegawai ASN karena petani saja yang pendapatannya kecil justru diwajibkan membayar zakat, sementara seorang eksekutif, seniman, pegawai ASN atau dokter justru dibiarkan tidak membayar zakat. Responden menjawab setuju 17 orang (51,6%) dan sangat setuju 15 orang (45,4%).
- 8) Butir pernyataan 8 mengenai pegawai merasa kurang bersyukur jika pendapatan yang didapat tidak saya keluarkan zakatnya. Responden menjawab setuju 18 orang (54,6%) dan sangat setuju 15 orang (45,4%).
- 9) Butir pernyataan 9 mengenai Muzakki Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan menunaikan zakat karena mempunyai penghasilan tambahan. Mayoritas responden menjawab setuju 29 responden dengan persentase 87,8%.

- 10) Butir pernyataan 10 mengenai Keuntungan yang di dapat dari TPP (kompensasi) selayaknya dibagi dengan orang yang berhak melalui zakat profesi. Responden menjawab setuju 19 orang (57,6%) dan sangat setuju 13 orang (39,4%).
- 11) Butir pernyataan 11 mengenai Dengan membayar zakat profesi pegawai bisa mewujudkan rasa syukur saya terhadap kompensasi yang saya dapat. Responden menjawab setuju 16 orang (48,5%) dan sangat setuju 17 orang (51,5%).
- 12) Butir pernyataan 12 mengenai Kompensasi yang diterima benar-benar dapat menaikkan motivasi untuk ikut membayar zakat profesi. Responden menjawab setuju 18 orang (54,6%) dan sangat setuju 14 orang (42,4%).
- 13) Butir pernyataan 13 mengenai Seorang pegawai ASN memang layak dikenakan zakat profesi karena kompensasi yang didapat beragam seperti tunjangan pensiun, THR dan lain-lain. Responden menjawab setuju 16 orang (48,5%) dan sangat setuju 16 orang (48,5%).
- 14) Butir pernyataan 14 mengenai Pemberian kompensasi dapat meningkatkan prestasi kerja dan memotivasi karyawan. Rspnden menajwab setuju 19 orang (57,6%) dan sangat setuju 13 orang (39,4%).
- 15) Butir pernyataan 15 mengenai pegawai membayar zakat profesi karena pendapatan bertambah dengan adanya kompensasi. Responden menjawab setuju 14 orang (42,4%) dan sangat setuju 19 orang (57,6%).

Berdasarkan hasil jawaban responden, variabel pendapatan dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan pernyataan yang diajukan kepada pegawai ASN didapatkan jawaban, sebagian besar pegawai menyatakan setuju. Hal ini dapat diartikan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji.

Tabel 4.7
Responden Terhadap Pengetahuan Agama (X₃)

Item Pertanyaan	Skor Jawaban Responden							
	SS		S		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%
1	4	12,2%%	29	87,8%	0	0%	0	0%
2	12	36%	21	64%	0	0%	0	0%
3	15	45,5%	17	51.5%	1	3%	0	0%
4	10	30%	23	70%	0	0%	0	0%
5	15	45,5%	17	51.5%	1	3%	0	0%
6	15	45,5%	17	51.5%	1	3%	0	0%
7	4	12%	29	87,8%	0	0%	0	0%
8	10	30%	23	70%	0	0%	0	0%
9	15	45,4%	18	54,6%	0	0%	0	0%
10	4	12%	29	87,8%	0	0%	0	0%
11	4	12%	29	87,8%	0	0%	0	0%
12	15	45,5%	17	51.5%	1	3%	0	0%
13	15	45,5%	17	51.5%	1	3%	0	0%
14	15	45,5%	17	51.5%	1	3%	0	0%
15	15	45,4%	18	54,6%	0	0%	0	0%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan beberapa pernyataan, yaitu :

- 1) Butir pernyataan 1 mengenai Zakat profesi merupakan zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mayoritas responden menjawab setuju 29 responden dengan persentase 87,8%.
- 2) Butir pernyataan 2 mengenai Muzakki menunaikan zakat karena mengetahui harta yang dimiliki telah mencapai nishab. Responden menjawab setuju 21 orang (64%) dan sangat setuju 12 orang (36%).
- 3) Butir pernyataan 3 mengenai Muzakki berzakat sebab mengetahui konsekuensi jika ia tidak menunaikan zakat sedangkan ia adalah orang yang berkewajiban. Responden menjawab setuju 17 orang (51,5%) dan sangat setuju 15 orang (45,5%).
- 4) Butir pernyataan 4 mengenai Muzakki menunaikan zakat karena mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam sama

seperti sholat. Responden menjawab setuju 23 orang (70%) dan sangat setuju 10 orang (30%).

- 5) Butir pernyataan 5 mengenai Muzakki mengetahui kadar zakat yang harus dikeluarkan dari penghasilan yang diterima. Responden menjawab setuju 17 orang (51,5%) dan sangat setuju 15 orang (45,5%).
- 6) Butir pernyataan 6 mengenai Muzakki membayar zakat karena ia akan merasa senang dapat meringankan beban saudara sesama yang membutuhkan. Responden menjawab setuju 17 orang (51,5%) dan sangat setuju 15 orang (45,5%).
- 7) Butir pernyataan 7 mengenai Pengelolaan zakat profesi lebih baik melalui pemotongan gaji langsung dari instansi terkait. Mayoritas responden menjawab setuju 29 responden dengan persentase 87,8%.
- 8) Butir pernyataan 8 mengenai pegawai selalu bersyukur kepada Allah SWT dengan berzakat profesi. Mayoritas responden menjawab setuju 23 responden dengan persentase 70%.
- 9) Butir pernyataan 9 mengenai Motivasi lain muzakki menunaikan zakat adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah dikaruniakan Allah SWT. Responden menjawab setuju 18 orang (54,6%) dan sangat setuju 15 orang (45,4%).
- 10) Butir pernyataan 10 mengenai dari penghasilan yang pegawai dapatkan ada hak untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Mayoritas responden menjawab setuju 29 responden dengan persentase 87,8%.
- 11) Butir pernyataan 11 mengenai pegawai berminat untuk berzakat karena merasa tenang jika sudah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan agama. Mayoritas responden menjawab setuju 29 responden dengan persentase 87,8%.
- 12) Butir pernyataan 12 mengenai pegawai berminat untuk berzakat karena merasa takut pendapatan yang saya miliki menjadi tidak berkah jika tidak ditunaikan zakat profesinya. Responden menjawab setuju 17 orang (51,5%) dan sangat setuju 15 orang (45,5%).

- 13) Butir pernyataan 13 mengenai pegawai berminat untuk ikut mengeluarkan zakat karena ingin membantu mengurangi angka kemiskinan di kota Medan. Responden menjawab setuju 17 orang (51,5%) dan sangat setuju 15 orang (45,5%).
- 14) Butir pernyataan 14 mengenai berminat untuk ikut mengeluarkan zakat karena mengetahui faedah dan hikmah orang yang berzakat. Responden menjawab setuju 17 orang (51,5%) dan sangat setuju 15 orang (45,5%).
- 15) Butir pernyataan 15 mengenai berminat ikut melaksanakan himbauan dari BAZNAS untuk membayar zakat profesi agar membantu menjaga nama baik Instansi saya. Responden menjawab setuju 18 orang (54,6%) dan sangat setuju 15 orang (45,4%).

Berdasarkan hasil jawaban responden, variabel pengetahuan agama dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan pernyataan yang diajukan kepada pegawai ASN didapatkan jawaban, sebagian besar pegawai menyatakan setuju. Hal ini dapat diartikan bahwa pengetahuan agama berpengaruh terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji.

Tabel 4.8
Responden Terhadap Kesediaan Pegawai ASN Membayar Zakat Profesi (Y)

Item Pertanyaan	Skor Jawaban Responden							
	SS		S		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%
1	17	51.5%	16	48,5%	0	0%	0	0%
2	4	12%	29	87,8%	0	0%	0	0%
3	15	45,5%	17	51.5%	1	3%	0	0%
4	13	48.5%	17	51.5%	0	0%	3	
5	15	45,5%	17	51.5%	1	3%	0	0%
6	0	0%	28	84,9%	5	15,1%	0	0%
7	12	36,4%	18	54,6%	3	9%	0	0%
8	17	51,5%	16	48,5%	0	0%	0	0%
9	15	45.5%	17	51.5%	1	3%	0	0%

10	0	0%	28	84,9%	5	15,1%	0	0%
11	15	45,4%	18	54,6%	0	0%	0	0%
12	4	12%	29	87,8%	0	0%	0	0%
13	0	0%	28	84,9%	5	15,1%	0	0%
14	4	2%	29	87,8%	0	0%	0	0%
15	14	42,4%	18	54,6%	1	3%	0	0%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan beberapa pernyataan, yaitu :

- 1) Butir pernyataan 1 mengenai pegawai ikut serta dalam penerapan zakat profesi melalui potongan gaji setiap bulan. Responden menjawab setuju 16 orang (48,5%) dan sangat setuju 17 orang (51,5%).
- 2) Butir pernyataan 2 mengenai pegawai membayar zakat profesi setiap bulan dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Mayoritas responden menjawab setuju 29 responden dengan persentase 87,8%.
- 3) Butir pernyataan 3 mengenai pegawai melaksanakan zakat profesi melalui pemotongan gaji setiap bulan sebanyak 2,5% dari gaji pokok saja. Responden menjawab setuju 17 orang (51,5%) dan sangat setuju 15 orang (45,5%).
- 4) Butir pernyataan 4 mengenai pegawai membayar zakat profesi sebanyak 2,5% dari akumulasi gaji pokok dan tunjangan kinerja. Responden menjawab setuju 17 orang (51,5%) dan sangat setuju 13 orang (48,5%).
- 5) Butir pernyataan 5 mengenai jika tidak ada penerapan potongan gaji untuk zakat profesi saya tetap membayar zakat melalui BAZNAS atau UPZ lainnya. Responden menjawab setuju 17 orang (51,5%) dan sangat setuju 15 orang (45,5%).
- 6) Butir pernyataan 6 mengenai pegawai merasa terbantu dengan adanya pengumpulan zakat melalui UPZ sehingga saya tidak perlu ke BAZNAS lagi. Mayoritas responden menjawab setuju 28 responden dengan persentase 84,9%.

- 7) Butir pernyataan 7 mengenai adanya pemotongan gaji untuk zakat profesi membantu saya untuk melaksanakan kewajiban sebagai Muslim. Responden menjawab setuju 18 orang (54,6%) dan sangat setuju 12 orang (36,4%).
- 8) Butir pernyataan 8 mengenai adanya potongan gaji untuk zakat profesi membantu pegawai mewujudkan rasa syukur atas pendapatan yang di dapat. Responden menjawab setuju 17 orang (51,5%) dan sangat setuju 16 orang (48,5%).
- 9) Butir pernyataan 9 mengenai dengan adanya zakat profesi membuat pegawai dapat menghindari sifat bakhil dan tidak ingin berbagi. Responden menjawab setuju 17 orang (51,5%) dan sangat setuju 15 orang (45,5%).
- 10) Butir pernyataan 10 mengenai Dengan adanya zakat profesi membuat saya sadar bahwa harta yang saya miliki bukan sepenuhnya milik saya. Mayoritas responden menjawab setuju 28 responden dengan persentase 84,9%.
- 11) Butir pernyataan 11 mengenai pegawai berpendapat prosedur yang ditetapkan oleh BAZNAS untuk pembayaran zakat profesi sudah baik. Responden menjawab setuju 18 orang (54,6%) dan sangat setuju 15 orang (45,4%).
- 12) Butir pernyataan 12 mengenai Pengawasan dari pihak BAZNAS sangat membantu untuk meningkatkan rasa percaya terhadap UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Mayoritas responden menjawab setuju 29 responden dengan persentase 87,8%.
- 13) Butir pernyataan 13 mengenai pegawai merasa pengelolaan dan pendistribusian dana zakat profesi sudah baik dan transparan. Mayoritas responden menjawab setuju 28 responden dengan persentase 84,9%.
- 14) Butir pernyataan 14 mengenai pegawai merasa pengumpulan zakat sangat efektif jika dilakukan oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat).

Mayoritas responden menjawab setuju 29 responden dengan persentase 87,8%.

- 15) Butir pernyataan 15 mengenai pegawai percaya jika dana dari zakat profesi sangat membantu untuk mengurangi kemiskinan. Responden menjawab setuju 18 orang (54,6%) dan sangat setuju 14 orang (42,4%).

Berdasarkan hasil jawaban responden, variabel Kesiediaan Pegawai ASN Membayar Zakat Profesi dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan pernyataan yang diajukan kepada pegawai ASN didapatkan jawaban, sebagian besar pegawai menyatakan setuju.

3. Teknik Analisa Data

a. Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrument. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas product moment pearson correlation, bisa dilakukan melalui beberapa cara, namun pada penelitian ini penulis menggunakan cara membandingkan nilai sig (2-tailed) dengan probabilitas 0,05 yaitu : Jika nilai sig (2-tailed) < 0,05 dan pearson correlation bernilai positif maka item soal angket tersebut valid. Sebaliknya jika nilai sig (2-tailed) > 0,05 dan pearson correlation bernilai negatif maka item soal angket tersebut tidak valid.

Tabel 4.9

Uji Validitas Kebijakan Pimpinan (X₁)

Variabel	Item	Nilai Korelasi	Nilai sig (2-tailed)	Keterangan
	1	0,801 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	2	0,549 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	3	0,631 (positif)	0,000 < 0,05	Valid

Kebijakan Pimpinan (X_1)	4	0,801 (positif)	$0,000 < 0,05$	Valid
	5	0,801 (positif)	$0,000 < 0,05$	Valid
	6	0,607 (positif)	$0,000 < 0,05$	Valid
	7	0,895 (positif)	$0,000 < 0,05$	Valid
	8	0,678 (positif)	$0,000 < 0,05$	Valid
	9	0,607 (positif)	$0,000 < 0,05$	Valid
	10	0,549 (positif)	$0,001 < 0,05$	Valid
	11	0,770 (positif)	$0,000 < 0,05$	Valid
	12	0,773 (positif)	$0,000 < 0,05$	Valid
	13	0, 549 (positif)	$0,001 < 0,05$	Valid
	14	0,770 (positif)	$0,000 < 0,05$	Valid
	15	0,770 (positif)	$0,000 < 0,05$	Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel kebijakan pimpinan (X_1) telah valid.

Tabel 4.10
Uji Validitas Pendapatan (X_2)

Variabel	Item	Nilai Korelasi	Nilai sig (2-tailed)	Keterangan
Pendapatan (X_2)	1	0,693 (positif)	$0,000 < 0,05$	Valid
	2	0,527 (positif)	$0,002 < 0,05$	Valid
	3	0,753 (positif)	$0,000 < 0,05$	Valid
	4	0,527 (positif)	$0,002 < 0,05$	Valid
	5	0,750 (positif)	$0,000 < 0,05$	Valid
	6	0,753 (positif)	$0,000 < 0,05$	Valid
	7	0,753 (positif)	$0,000 < 0,05$	Valid
	8	0,52 (positif)	$0,000 < 0,05$	Valid
	9	0,693 (positif)	$0,000 < 0,05$	Valid
	10	0,793 (positif)	$0,000 < 0,05$	Valid

	11	0,750 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	12	0,793 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	13	0, 753 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	14	0,544 (positif)	0,001 < 0,05	Valid
	15	0,750 (positif)	0,000 < 0,05	Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel pendapatan (X_2) telah valid.

Tabel 4.11
Uji Validitas Pengetahuan Agama (X_3)

Variabel	Item	Nilai Korelasi	Nilai sig (2-tailed)	Keterangan
Pengetahuan Agama (X_3)	1	0,552 (positif)	0,001 < 0,05	Valid
	2	0,507 (positif)	0,003 < 0,05	Valid
	3	0,938 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	4	0,477 (positif)	0,005 < 0,05	Valid
	5	0,938 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	6	0,938 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	7	0,552 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	8	0,477 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	9	0,600 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	10	0,552 (positif)	0,001 < 0,05	Valid
	11	0,552 (positif)	0,001 < 0,05	Valid
	12	0,938 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	13	0, 938 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	14	0,938 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	15	0,600 (positif)	0,000 < 0,05	Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel pengetahuan agama (X_3) telah valid.

Tabel 4.12
Uji Validitas Kesiediaan Pegawai ASN Membayar Zakat Profesi Melalui
Potongan Gaji (Y)

Variabel	Item	Nilai Korelasi	Nilai sig (2-tailed)	Keterangan
Kesiediaan Pegawai ASN Membayar Zakat Profesi Melalui Potongan Gaji (Y_1)	1	0,701 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	2	0,557 (positif)	0,001 < 0,05	Valid
	3	0,776 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	4	0,537 (positif)	0,001 < 0,05	Valid
	5	0,776 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	6	0,715 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	7	0,753 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	8	0,701 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	9	0,776 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	10	0,715 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	11	0,607 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	12	0,557 (positif)	0,001 < 0,05	Valid
	13	0, 715 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	14	0,557 (positif)	0,001 < 0,05	Valid
	15	0,776 (positif)	0,000 < 0,05	Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa seluruh item pertanyaan pada variabel kesiediaan pegawai ASN membayar zakat profesi melalui potongan gaji (Y_1) telah valid.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ditujukan untuk melihat apakah instrumen penelitian dapat dipercaya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah : Jika nilai Alpha Cronbach's $> r_{\text{tabel}}$ maka item yang digunakan dinyatakan reliabel atau konsisten. Sedangkan jika nilai Alpha Cronbach's $< r_{\text{tabel}}$ maka item yang digunakan dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

Tabel 4.13
Uji Reliabilitas Kebijakan Pimpinan (X_1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,916	15

Dari perhitungan reabilitas diperoleh nilai Alpha Cronbach sebesar 0,916. Nilai tersebut lebih besar dari nilai r_{tabel} pada taraf signifikan 5% dengan $N=31$, dan diperoleh nilai r_{tabel} 0,325. Jadi dapat dinyatakan bahwa pernyataan dalam variabel Kebijakan Pimpinan (X_1) ini adalah reliabel karena $r_{\text{alpha}} > r_{\text{tabel}}$ ($0,916 > 0,325$).

Tabel 4.14
Uji Reliabilitas Pendapatan (X_2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,916	15

Dari perhitungan reabilitas diperoleh nilai Alpha Cronbach sebesar 0,916. Nilai tersebut lebih besar dari nilai r_{tabel} pada taraf signifikan 5% dengan $N=31$, dan diperoleh nilai r_{tabel} 0,325. Jadi dapat dinyatakan bahwa pernyataan dalam variabel Pendapatan (X_2) ini adalah reliabel karena $r_{\text{alpha}} > r_{\text{tabel}}$ ($0,916 > 0,325$).

Tabel 4.15
Uji Reliabilitas Pengetahuan Agama (X_3)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,932	15

Dari perhitungan reabilitas diperoleh nilai Alpha Cronbach sebesar 0,932. Nilai tersebut lebih besar dari nilai r_{tabel} pada taraf signifikan 5% dengan $N=31$, dan diperoleh nilai r_{tabel} 0,325. Jadi dapat dinyatakan bahwa pernyataan dalam variabel Pengetahuan Agama (X_3) ini adalah reliabel karena $r_{\text{alpha}} > r_{\text{tabel}}$ ($0,932 > 0,325$).

Tabel 4.16
Uji Reliabilitas Kesiediaan Pegawai ASN Membayar Zakat Profesi Melalui Potongan Gaji (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,907	15

Dari perhitungan reabilitas diperoleh nilai Alpha Cronbach sebesar 0,907. Nilai tersebut lebih besar dari nilai r_{tabel} pada taraf signifikan 5% dengan $N=31$, dan diperoleh nilai r_{tabel} 0,325. Jadi dapat dinyatakan bahwa pernyataan dalam variabel Kesiediaan Pegawai ASN Membayar Zakat Profesi Melalui Potongan Gaji (Y_1) ini adalah reliabel karena $r_{\text{alpha}} > r_{\text{tabel}}$ ($0,907 > 0,325$).

b. Uji Asumsi Klasik

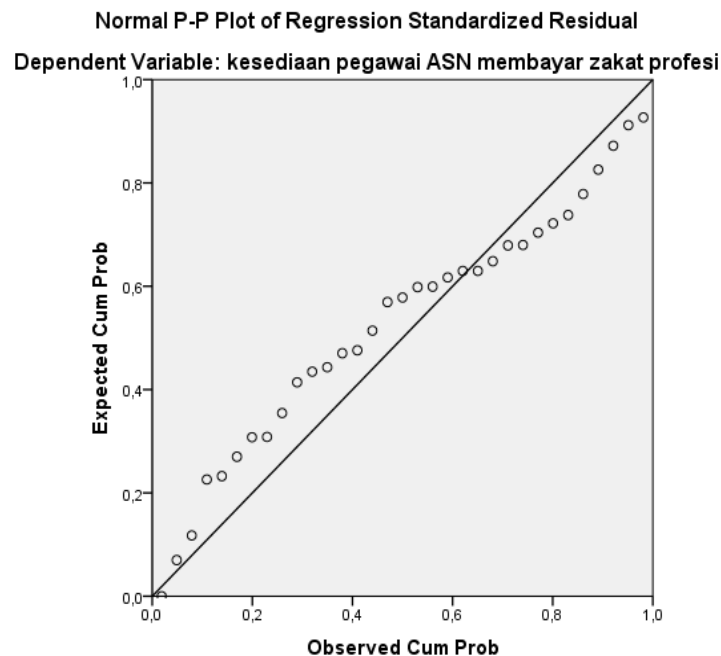
1) Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah data dapat dikatakan berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data adalah :

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Normal Probability Plot atau P-P-Plot menjadi salah satu alternatif yang cukup efektif untuk mendeteksi apakah data yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak.

Tabel 4.17
Uji Normalitas P P-Plot



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada selalu mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal sehingga syarat normalitas dapat terpenuhi.

2) Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabelin dependen. Interkorelasi itu dapat dilihat pada tabel Coefficients dengan ketentuan bahwa nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF $< 10,00$.

Tabel 4.18
Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-10,865	3,578		-3,036	,005		
1 Kebijakan Pimpinan	,350	,118	,284	2,966	,006	,266	3,762
Pendapatan	,567	,101	,557	5,636	,000	,249	4,012
Pengetahuan Agama	,282	,087	,211	3,222	,003	,568	1,762

a. Dependent Variable: Kesiediaan Pegawai Membayar Zakat Profesi

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

- a) Nilai tolerance kebijakan Pimpinan (X_1) $0,266 > 0,10$ dan nilai VIF $3,762 < 10,00$. Maka dapat dikatakan pada variabel ini tidak terjadi multikolonieritas.
- b) Nilai tolerance pendapatan (X_2) $0,249 > 0,10$ dan nilai VIF $4,012 < 10,00$. Maka dapat dikatakan pada variabel ini tidak terjadi multikolonieritas.
- c) Nilai tolerance pengetahuan agama (X_3) $0,568 > 0,10$ dan nilai VIF $1,762 < 10,00$. Maka dapat dikatakan pada variabel tidak terjadi multikolonieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Glejser dengan ketentuan bahwa nilai sig $> 0,05$ maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.19
Uji Heteroskedastisitas Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,694	,351	1,981	,057
	kebijakan pimpinan	-,059	,029	-1,769	,054
	Pendapatan	,064	,034	2,078	,065
	pengetahuan agama	-,017	,012	-,514	,181

a. Dependent Variable: RES2

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

- a) Dikatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dengan metode glejser yaitu jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05. Untuk melihat nilai signifikansi dapat dilihat melalui tabel coefficients. Nilai signifikan yang diperoleh dari tabel yaitu $0,054 > 0,05$ kemudian $0,065 > 0,05$ dan $0,181 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya masalah heteroskedastisitas dalam hasil penelitian ini.

c. Uji Regresi Berganda

Regresi berganda digunakan jika terdapat lebih dari satu buah variable independen dan hanya ada satu buah variable dependen. Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi perubahan nilai variabel dependen akibat pengaruh dari nilai variabelin dependen.

Persamaan regresi berganda secara umum adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Tabel 4.20
Koefisien Regresi

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-10,865	3,578	-3,036	,005		
	Kebijakan Pimpinan	,350	,118	,284	,006	,266	3,762
	Pendapatan	,567	,101	,557	,000	,249	4,012
	Pengetahuan Agama	,282	,087	,211	,003	,568	1,762

a. Dependent Variable: Kesiediaan Pegawai Membayar Zakat Profesi

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh hasil persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = -10,865 + 0,350X_1 + 0,567X_2 + 0,282X_3 + 3,578$$

- 1) Konstanta sebesar -10,865 menyatakan bahwa jika X_1 , X_2 dan X_3 diabaikan maka akan terjadi penurunan kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi sebesar -10,865.
- 2) Koefisien regresi variabel X_1 sebesar 0,350 menyatakan bahwa setiap kebijakan pimpinan akan mempengaruhi kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi sebesar 0,350.
- 3) Koefisien regresi variabel X_2 sebesar 0,567 menyatakan bahwa setiap pendapatan akan mempengaruhi kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi sebesar 0,567.
- 4) Koefisien regresi variabel X_3 sebesar 0,282 menyatakan bahwa setiap pengetahuan agama akan mempengaruhi kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi sebesar 0,282.

d. Uji Hipotesis

1) Uji R^2

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai R Square mendekati nilai 100% maka pengaruh variabel X terhadap variabel Y berpengaruh positif (kuat).

Tabel 4.21
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,964 ^a	,929	,922	1,30355	1,981

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Agama, Pendapatan, Kebijakan Pimpinan

b. Dependent Variable: Kesiediaan Pegawai Membayar Zakat Profesi

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a) Besar porsi variabel X terhadap variabel Y dilihat dari nilai R Square adalah sebesar 0,929 atau sebesar 92,7 % , maka 7,3 % dipengaruhi oleh variabel lain.

2) Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variable independen yang digunakan dalam model regresi secara bersama-sama atau simultan dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Dikatakan seluruh variabel X berpengaruh terhadap variabel Y secara bersama-sama jika nilai sig < 0,05 dan nilai $F_{\text{six}} > \text{tabel F}$.

Tabel 4.22
Uji F (Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	649,449	3	216,483	127,399	,000 ^b
Residual	49,278	29	1,699		
Total	698,727	32			

a. Dependent Variable: Kesiediaan Pegawai Membayar Zakat Profesi

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Agama, Pendapatan, Kebijakan Pimpinan

Berdasarkan tabel diperoleh hasil sebagai berikut :

- a) Angka F_{tabel} yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah sebesar 2,93 diperoleh dari rumus $F = (k : n-k) = (3:29) = 2,93$. F_{six} yang diperoleh adalah sebesar $127,399 > 2,93$ dan taraf signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel X (kebijakan pimpinan, pendapatan dan pengetahuan agama) berpengaruh positif secara simultan terhadap variabel Y (kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi).

3) Uji t (Parsial)

Uji t (parsial) yaitu untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dikatakan berpengaruh jika nilai $\text{sig} < 0,05$ dan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$.

Tabel 4.23
Uji t (Parsial)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-10,865	3,578		-3,036	,005
Kebijakan Pimpinan	,350	,118	,284	2,966	,006
Pendapatan	,567	,101	,557	5,636	,000
Pengetahuan Agama	,282	,087	,211	3,222	,003

a. Dependent Variable: Kesiediaan Pegawai Membayar Zakat profesi

Berdasarkan tabel diperoleh hasil sebagai berikut :

- Variabel Kebijakan Pimpinan memiliki taraf signifikan sebesar $0,006 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $2,966 > 2,045$, t_{tabel} diperoleh dari rumus $t_{tabel} = (a/2 : n-k) = (0,025 : 29)$ maka t_{tabel} yaitu sebesar 2,045. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kebijakan Pimpinan berpengaruh positif secara parsial terhadap variabel kesiediaan pegawai ASN membayar zakat profesi.
- Variabel Pendapatan memiliki taraf signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $5,636 > 2,045$, t_{tabel} diperoleh dari rumus $t_{tabel} = (a/2 : n-k) = (0,025 : 29)$ maka t_{tabel} yaitu sebesar 2,045. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan berpengaruh positif secara parsial terhadap variabel kesiediaan karyawan membayar zakat profesi.
- Variabel Pengetahuan Agama memiliki taraf signifikan sebesar $0,003 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $3,222 > 2,045$, t_{tabel} diperoleh dari rumus $t_{tabel} = (a/2 : n-k) = (0,025 : 29)$ maka t_{tabel} yaitu sebesar 2,045. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Agama berpengaruh Positif secara parsial terhadap variabel kesiediaan karyawan membayar zakat profesi.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan angket kepada responden dan mengumpulkannya kembali. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pimpinan, pendapatan dan pengetahuan agama terhadap kesediaan pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji. Peneliti melakukan pengujian analisis data dengan menggunakan program SPSS. Adapun hasil yang didapatkan adalah :

1. Pengaruh Kebijakan Pimpinan Terhadap Kesediaan Pegawai ASN Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji.

Kebijakan pemimpin merupakan arahan maupun instruksi dari atasan kepada anggotanya guna mencapai tujuan yang diinginkan. Seorang pemimpin harus mampu menempatkan kekuasaan yang dimiliki dengan baik. Kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama dibawah kepemimpinannya sebagai satu tim untuk mencapai tujuan tertentu. Instruksi pimpinan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap jalannya kebijakan yang dibuat.

Maka dalam penelitian ini diusulkan hipotesis sebagai berikut : H_{a1} = kebijakan pimpinan (X_1) berpengaruh positif terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji. Sehingga dalam penelitian ini dapat dibuktikan bahwa kebijakan pimpinan (X_1) memang mempengaruhi kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji, dapat dilihat dari nilai uji t yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ $2,966 > 2,045$ dan dapat disimpulkan bahwa kebijakan pimpinan (X_1) berpengaruh secara parsial terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji sehingga H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak.

2. Pengaruh Pendapatan Terhadap Kesediaan Pegawai ASN Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji.

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk

didalamnya gaji/upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha. Dengan demikian, pendapatan seseorang sangat mempengaruhi untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, disamping pula berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzakki.

Maka dalam penelitian ini diusulkan hipotesis sebagai berikut : H_{a2} = pendapatan (X_2) berpengaruh positif terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji. Sehingga dalam penelitian ini dapat dibuktikan bahwa pendapatan (X_2) memang mempengaruhi kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji, dapat dilihat dari nilai uji t yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ $5,636 > 2,045$ dan dapat disimpulkan bahwa pendapatan (X_2) berpengaruh secara parsial terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji sehingga H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak.

3. Pengaruh Pengetahuan Agama Terhadap Kesediaan Pegawai ASN Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji.

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui, dimengerti dan dipahami. Dasar pengetahuan seseorang dapat berasal dari pengalaman, ingatan, rasa ingin tahu dan lain sebagainya. Pengetahuan dalam penelitian ini adalah sesuatu yang diketahui tentang zakat profesi berdasarkan hasil belajar atau pengalaman seseorang tentang kewajiban seorang muslim membayar zakat profesi. Dalam penelitian ini mencakup apakah faktor pengetahuan berpengaruh terhadap penerapan zakat profesi Aparatur Sipil Negara Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan.

Maka dalam penelitian ini diusulkan hipotesis sebagai berikut : H_{a3} = pengetahuan agama (X_3) berpengaruh positif terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji. Sehingga dalam penelitian ini dapat dibuktikan bahwa pengetahuan agama (X_3) memang mempengaruhi kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji, dapat dilihat dari nilai uji t yaitu $t_{hitung} > t_{tabel}$ $3,222 > 2,045$ dan dapat

disimpulkan bahwa pengetahuan agama (X_3) berpengaruh secara parsial terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji sehingga H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak.

4. Pengaruh Kebijakan Pimpinan, Pendapatan dan Pengetahuan Agama Terhadap Kesediaan Pegawai ASN Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji.

Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa kebijakan pimpinan, pendapatan dan pengetahuan agama sama-sama mempunyai hubungan dan pengaruh positif terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji. Dapat dilihat dari F_{hitung} dimana nilai $F = 127,399$ dengan tingkat probabilitas ($0,000 < 0,05$). Angka F_{tabel} yang diperoleh dari hasil perhitungan adalah sebesar 2,93 diperoleh dari rumus $F = (k : n-k) = (3:29) = 2,93$. F_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar $127,399 > 2,93$. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan koefisien arah regresi ganda sangat berarti pada taraf signifikan 5% yang artinya bahwa kebijakan pimpinan, pendapatan dan pengetahuan agama berpengaruh positif terhadap kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi melalui pemotongan gaji.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan hubungan yang sangat signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dapat dilihat dari nilai *R square* yang mencapai 92,7 %, maka variabel lain hanya mempengaruhi 7,3% saja. Jika nilai *R square* mendekati nilai 100% maka pengaruh variabel X terhadap variabel Y berpengaruh positif (kuat).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang diperoleh variabel kebijakan pimpinan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesediaan pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan membayar zakat profesi melalui potongan gaji setiap bulannya (Y). Berdasarkan hubungan positif tersebut menginformasikan bahwa kebijakan pimpinan di suatu Instansi sangat berpengaruh terhadap jalannya kebijakan yang dibuat, sehingga H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak.
2. Berdasarkan data yang diperoleh untuk variabel pendapatan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesediaan pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan membayar zakat profesi melalui potongan gaji setiap bulannya (Y). Berdasarkan hubungan positif tersebut menginformasikan bahwa pendapatan seorang PNS berpengaruh terhadap kesediaannya menjalankan zakat profesi melalui potongan gaji setiap bulannya, sehingga H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak.
3. Berdasarkan data yang diperoleh variabel pengetahuan agama (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesediaan pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan membayar zakat profesi melalui potongan gaji setiap bulannya (Y). Berdasarkan hubungan positif tersebut menyimpulkan bahwa pengetahuan agama seseorang khususnya mengenai perihal zakat profesi berpengaruh terhadap kesediaannya menjalankan zakat profesi melalui potongan gaji setiap bulannya ditambah adanya dorongan dari pimpinan sebuah Instansi, sehingga H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak.

4. Sedangkan data yang diperoleh melalui uji F (Simultan) variabel kebijakan pimpinan (X_1), pendapatan (X_2) dan pengetahuan agama (X_3) memiliki hubungan yang positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kesediaan pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan membayar zakat profesi melalui potongan gaji setiap bulannya (Y).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa besarnya potensi zakat profesi / penghasilan pegawai ASN, untuk menghindari pro kontra diantara para pegawai baiknya seorang pimpinan menegaskan kewajiban zakat profesi kepada para pegawai sehingga mampu membantu mengurangi angka kemiskinan khususnya di Kota Medan.
2. Diharapkan adanya agenda untuk peningkatan wawasan pengetahuan agama para pegawai ASN mengenai zakat profesi, sehingga para pegawai yang memiliki tunjangan atau pendapatan yang lebih kecil tidak sampai menolak ikut membayar zakat profesi. Karena membayar zakat profesi dapat menjadi cara untuk mewujudkan rasa syukur atas profesi yang diperoleh.
3. Untuk meningkatkan dan menambah wawasan pengetahuan agama para pegawai ASN mengenai zakat profesi sebaiknya diadakan sosialisasi intensif baik berupa ceramah umum, penyebaran leaflet dll sehingga dapat membantu BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat profesi kepada para pegawai.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih mendalam tentang pengaruh lain yang dapat mempengaruhi kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi melalui potongan gaji setiap bulannya, seperti faktor umur, pendidikan, kepercayaan terhadap LAZ dan lain sebagainya sehingga dapat menyempurnakan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, M. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
- Ash-Shiddieqy, M Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam*. Jakarta: Zahra, 2008.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung : PR Remaja Rosdakarya, 2008.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakah : Dirastu Muqoranatu Li Akhkamiha wa Falsafatiha fi Dhau'i al-Qur'an wa ash-Shunnah*. Juz, I : Beirut : Muassasatu Ar-Risalah, 1991.
- Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Fakhrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Cet I : Malang : UIN Malang Press, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. Bandung : Fokusmedia, 2012.
- Huda, Nurul et. *Zakat Perspektif Mikro-Makro : Pendekatan Riset*. Jakarta : Prenamedia Group, 2015.
- Ikhsan, Arfan dan Misri. *Metodologi Penelitian untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Jaya, Indra. *Penerapan Statistik Untuk Pendidik*. Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Juliandi, Azuar dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional, 1997.

- Permono, Sjekhul Hadi. *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- Samsudin, Sadili. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Pustaka Setia, 2006.
- Syahrurum & Salim. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Citapustaka Media, 2013.
- Sudarminta, J. *Epistemologi Dasar*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Sudirman. *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang : UIN Malang Press, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2008.
- Supangat, Andi. *Statistika dalam Pengkajian Deskriptif, Inferensial dan Non-Parametrik*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Syu'aibun. *Zakat Profesi Menurut Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara*. Bandung : Citapustaka Media, 2004.
- Trihendradi, C. *7 Langkah Mudah Melakukan Analisis Statistik*. Yogyakarta: Andi, 2009.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia, 2015.
- Santoso, Urip : <http://uripsantoso.wordpress.com/2010/08/30/meneladani-empat-at-rasulullah/sif>

LAMPIRAN

Medan, 30 November 2018

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Pegawai ASN Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan

di tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Kebijakan Pimpinan, Pendapatan dan Pengetahuan Agama terhadap Kesiediaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan membayar Zakat Profesi melalui pemotongan gaji”, maka saya membutuhkan beberapa informasi dari Bapak/Ibu melalui pengisian angket penelitian ini. Untuk keperluan tersebut maka dengan segala kerendahan hati saya mohon kesediaan dan kejujuran Bapak/Ibu untuk berkenan meluangkan waktu mengisi angket ini dengan tulus sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu.

Pengisian angket ini semata-mata hanya demi kepentingan penyelesaian skripsi ini dan kesediaan serta kejujuran Bapak/Ibu sangat saya hargai serta dijamin kerahasiaannya, sehingga tidak akan merugikan Bapak/Ibu dan tidak berpengaruh terhadap kedudukan Bapak/Ibu sebagai pegawai ASN.

Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Jamilah Harahap
Peneliti

Lampiran 1 : Instrumen Penelitian

KUISIONER

Analisis Faktor Kebijakan Pimpinan, Pendapatan dan Pengetahuan Agama Terhadap Kesediaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan Membayar Zakat Profesi Melalui Pemotongan Gaji

A. Identitas Diri

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data responden dibawah ini.

- Nama : _____
- Jenis Kelamin : ☐ laki-laki ☐ Perempuan
- Umur : ☐ 17-29 th
☐ 30-40 th
☐ > 40 th
- Penghasilan : ☐ 2.000.000 - 4.000.000
☐ 4.000.000 – 6.000.000
☐ 6.000.000 – 8.000.000
☐ > 8.000.000

B. Petunjuk Pengisian Angket

Berilah tanda (X) pada kolom yang Bapak/Ibu pilih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan alternative jawaban sebagai berikut :

- SS : Bila anda sangat setuju dengan pertanyaan tersebut
- S : Bila anda setuju dengan pertanyaan tersebut

TS : Bila anda tidak setuju dengan pertanyaan tersebut

STS : Bila anda sangat tidak setuju dengan pertanyaan tersebut

Saya berharap bapak/ibu menjawab semua pertanyaan yang ada.

KEBIJAKAN PIMPINAN

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya membayar zakat profesi karena mengikuti kebijakan dari pimpinan kantor setelah adanya himbauan dari BAZNAS.				
2	Saya sangat mendukung kebijakan pimpinan dalam menerapkan zakat profesi melalui potongan gaji karena membantu pegawai melaksanakan salah satu rukun Islam.				
3	Saya ikut membayar zakat profesi karena pimpinan saya juga ikut melaksanakannya.				
4	Saya setuju dengan kebijakan pimpinan atas potongan gaji setiap bulan untuk zakat profesi karena profesi ASN merupakan profesi yang berpotensi besar untuk dikeluarkan zakat atas pendapatannya.				
5	Saya membayar zakat profesi dengan sepenuh hati walaupun karena adanya kebijakan dan dukungan pimpinan atas himbauan dari BAZNAS Kota Medan.				
6	Kebijakan pimpinan sangat berpengaruh terhadap di terapkannya zakat profesi melalui potongan gaji setiap bulannya di Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan.				
7	Penerapan zakat profesi sebaiknya di terapkan di seluruh kantor sehingga seluruh pegawai muslim				

	menunaikan zakat profesinya.				
8	Saya merasa pimpinan saya mampu menempatkan kekuasaan yang dimiliki pada kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi pegawainya.				
9	Saya salut dengan gaya kepemimpinan pemimpin saya yang mampu mengayomi bawahannya dengan kekuasaan yang dimilikinya.				
10	Pemimpin saya mampu menumbuhkan kesadaran saya tentang pentingnya menempatkan kekuasaan dengan baik dan benar.				
11	Pimpinan memiliki wewenang untuk menerapkan kebijakan yang baik.				
12	Saya merasa pimpinan saya sangat amanah dalam menjalankan wewenangnya dengan ikut membantu melaksanakan himbauan dari BAZNAS untuk membayar zakat profesi melalui potongan gaji setiap bulannya.				
13	Saya sangat mendukung segala wewenang yang diterapkan pimpinan dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama.				
14	Pimpinan sangat bertanggung jawab atas wewenang yang dibuat dengan ikut serta membayar zakat profesi melalui potongan gaji.				
15	Kebijakan yang diterapkan oleh pemimpin dapat mempengaruhi personal pemimpin itu sendiri.				

PENDAPATAN

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Muzakki menunaikan zakat karena dipengaruhi oleh tingkat pendapatan.				
2	Saya akan berzakat jika pendapatan				

	saya sampai pada nishabnya walaupun dengan tidak adanya tunjangan gaji pokok.				
3	Zakat tidak mengurangi hasil pendapatan saya untuk kebutuhan sehari-hari.				
4	Saya yakin dengan berzakat pendapatan saya akan semakin berkah dan lancar.				
5	Dengan meningkatnya pendapatan perkapita maka jumlah orang yang membayar zakat meningkat, dan zakat nantinya akan merubah penerima dari kondisi mustahik menjadi muzakki.				
6	Muzakki membayar zakat profesi dari gaji yang diperoleh bertujuan untuk membersihkan harta setiap bulannya.				
7	Menurut saya zakat profesi layak dikeluarkan seorang pegawai ASN karena petani saja yang pendapatannya kecil justru diwajibkan membayar zakat, sementara seorang eksekutif, seniman, pegawai ASN atau dokter justru dibiarkan tidak membayar zakat.				
8	Saya merasa kurang bersyukur jika pendapatan yang didapat tidak saya keluarkan zakatnya.				
9	Muzakki Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan menunaikan zakat karena mempunyai penghasilan tambahan.				
10	Keuntungan yang saya dapat dari TPP (kompensasi) selayaknya dibagi dengan orang yang berhak melalui zakat profesi.				
11	Dengan membayar zakat profesi				

	saya bisa mewujudkan rasa syukur saya terhadap kompensasi yang saya dapat.				
12	Kompensasi yang diterima benar-benar dapat menaikkan motivasi untuk ikut membayar zakat profesi.				
13	Seorang pegawai ASN memang layak dikenakan zakat profesi karena kompensasi yang didapat beragam seperti tunjangan pensiun, THR dan lain-lain.				
14	Pemberian kompensasi dapat meningkatkan prestasi kerja dan memotivasi karyawan.				
15	Saya membayar zakat profesi karena pendapatan saya bertambah dengan adanya kompensasi.				

PENGETAHUAN AGAMA

NO	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Zakat profesi merupakan zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya.				
2	Muzakki menunaikan zakat karena mengetahui harta yang dimiliki telah mencapai nishab.				
3	Muzakki berzakat sebab mengetahui konsekuensi jika ia tidak menunaikan zakat sedangkan ia adalah orang yang berkewajiban.				
4	Muzakki menunaikan zakat karena mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam sama seperti sholat.				
5	Muzakki mengetahui kadar zakat yang harus dikeluarkan dari penghasilan yang diterima.				
6	Muzakki membayar zakat karena ia akan merasa senang dapat				

	meringankan beban saudara sesama yang membutuhkan.				
7	Pengelolaan zakat profesi lebih baik melalui pemotongan gaji langsung dari instansi terkait.				
8	Saudara selalu bersyukur kepada Allah SWT dengan berzakat profesi.				
9	Motivasi lain muzakki menunaikan zakat adalah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah dikaruniakan Allah SWT.				
10	Dari penghasilan yang saudara dapatkan ada hak untuk membantu orang-orang yang kekurangan.				
11	Saya berminat untuk berzakat karena saya merasa tenang jika sudah melaksanakan kewajiban yang diperintahkan agama.				
12	Saya berminat untuk berzakat karena merasa takut pendapatan yang saya miliki menjadi tidak berkah jika tidak ditunaikan zakat profesinya.				
13	Saya berminat untuk ikut mengeluarkan zakat karena saya ingin membantu mengurangi angka kemiskinan di kota Medan.				
14	Saya berminat untuk ikut mengeluarkan zakat karena saya mengetahui faedah dan hikmah orang yang berzakat.				
15	Saya berminat ikut melaksanakan himbauan dari BAZNAS untuk membayar zakat profesi agar membantu menjaga nama baik Instansi saya.				

KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI

NO	Per	STS	TS	S	SS
1	Saya ikut serta dalam penerapan zakat profesi melalui potongan gaji setiap bulan.				
2	Saya membayar zakat profesi setiap bulan dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun.				
3	Saya melaksanakan zakat profesi melalui pemotongan gaji setiap bulan sebanyak 2,5% dari gaji pokok saja.				
4	Saya membayar zakat profesi sebanyak 2,5% dari akumulasi gaji pokok dan tunjangan kinerja.				
5	Jika tidak ada penerapan potongan gaji untuk zakat profesi saya tetap membayar zakat melalui BAZNAS atau UPZ lainnya.				
6	Saya merasa terbantu dengan adanya pengumpulan zakat melalui UPZ sehingga saya tidak perlu ke BAZNAS lagi.				
7	Adanya pemotongan gaji untuk zakat profesi membantu saya untuk melaksanakan kewajiban sebagai Muslim.				
8	Adanya potongan gaji untuk zakat profesi membantu saya mewujudkan rasa syukur atas pendapatan yang saya dapat.				
9	Dengan adanya zakat profesi membuat saya dapat menghindari sifat bakhil dan tidak ingin berbagi.				
10	Dengan adanya zakat profesi membuat saya sadar bahwa harta yang saya miliki bukan sepenuhnya milik saya.				

11	Menurut saya prosedur yang ditetapkan oleh BAZNAS untuk pembayaran zakat profesi sudah baik.				
12	Pengawasan dari pihak BAZNAS sangat membantu untuk meningkatkan rasa percaya terhadap UPZ (Unit Pengumpul Zakat)				
13	Saya merasa pengelolaan dan pendistribusian dana zakat profesi sudah baik dan transparan.				
14	Menurut saya pengumpulan zakat sangat efektif jika dilakukan oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat).				
15	Saya percaya jika dana dari zakat profesi sangat membantu untuk mengurangi kemiskinan.				

Lampiran 2 : Data Mentah

Kebijakan Pimpinan (X_1)

RES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	jumlah
1	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	47
2	2	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	45
3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	55
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
5	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	48
6	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	49
7	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	50
8	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	49
9	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	46
10	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	49
11	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	51
12	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	52
13	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	50
14	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	47
15	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
16	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	55
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
19	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	46
20	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	50
21	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	50
22	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	51
23	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	51
24	2	3	3	2	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	47
25	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	55
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
28	3	3	4	3	3	2	3	3	2	3	4	3	3	4	4	47
29	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	52
30	2	3	1	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	38
31	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	55
32	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	51
33	2	3	3	3	2	3	2	4	3	3	3	4	3	3	4	45

Pendapatan (X₂)

RES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	jumlah
1	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	50
2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	3	1	3	39
3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	57
4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	46
5	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	51
6	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	52
7	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	52
8	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	49
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
10	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	49
11	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	55
12	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	55
13	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	53
14	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	49
15	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	49
16	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	57
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
19	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	47
20	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	51
21	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	52
22	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	54
23	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	53
24	2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	47
25	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	57
26	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	46
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
28	3	3	2	3	4	2	2	3	3	3	4	3	2	4	4	45
29	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	56
30	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	45
31	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	57
32	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	54
33	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	52

Pengetahuan Agama (X₃)

RES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	jumlah
1	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	56
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	57
4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	47
5	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	54
6	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	51
7	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	48
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
11	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	56
12	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	53
13	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	55
14	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	54
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
16	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	58
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
19	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	50
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
21	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	47
22	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	53
23	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	3	54
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
25	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	58
26	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	48
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
28	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	39
29	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	56
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
31	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	57
32	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	53
33	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	48

Kesediaan Pegawai ASN Membayar Zakat Profesi (Y₁)

RES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	jumlah
1	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	50
2	3	3	3	1	3	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	39
3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	56
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	46
5	3	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	50
6	3	3	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	51
7	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	50
8	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	48
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
10	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	48
11	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	53
12	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	53
13	4	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	52
14	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	49
15	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	41
16	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	56
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
19	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	47
20	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	49
21	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	50
22	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	53
23	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	52
24	3	3	3	1	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	40
25	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	56
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	46
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
28	4	3	2	4	2	3	3	4	2	3	3	3	3	3	2	44
29	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	54
30	3	3	3	1	3	2	3	3	3	2	3	3	2	3	3	40
31	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	56
32	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	53
33	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	2	3	3	41

Lampiran 3 : Hasil SPSS BAB IV

A. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas dan Relianbilitas

Uji Validitas Kebijakan Pimpinan (X_1)

Variabel	Item	Nilai Korelasi	Nilai sig (2-tailed)	Keterangan
Kebijakan Pimpinan (X_1)	1	0,801 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	2	0,549 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	3	0,631 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	4	0,801 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	5	0,801 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	6	0,607 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	7	0,895 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	8	0,678 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	9	0,607 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	10	0,549 (positif)	0,001 < 0,05	Valid
	11	0,770 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	12	0,773 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	13	0, 549 (positif)	0,001 < 0,05	Valid
	14	0,770 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	15	0,770 (positif)	0,000 < 0,05	Valid

Uji Reliabilitas Kebijakan Pimpinan (X_1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,916	15

Uji Validitas Pendapatan (X₂)

Variabel	Item	Nilai Korelasi	Nilai sig (2-tailed)	Keterangan
Pendapatan (X ₂)	1	0,693 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	2	0,527 (positif)	0,002 < 0,05	Valid
	3	0,753 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	4	0,527 (positif)	0,002 < 0,05	Valid
	5	0,750 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	6	0,753 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	7	0,753 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	8	0,52 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	9	0,693 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	10	0,793 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	11	0,750 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	12	0,793 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	13	0,753 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	14	0,544 (positif)	0,001 < 0,05	Valid
	15	0,750 (positif)	0,000 < 0,05	Valid

Uji Reliabilitas Pendapatan (X₂)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,916	15

Uji Validitas Pengetahuan Agama (X₃)

Variabel	Item	Nilai Korelasi	Nilai sig (2-tailed)	Keterangan
Pengetahuan Agama (X ₃)	1	0,552 (positif)	0,001 < 0,05	Valid
	2	0,507 (positif)	0,003 < 0,05	Valid
	3	0,938 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	4	0,477 (positif)	0,005 < 0,05	Valid
	5	0,938 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	6	0,938 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	7	0,552 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	8	0,477 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	9	0,600 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	10	0,552 (positif)	0,001 < 0,05	Valid
	11	0,552 (positif)	0,001 < 0,05	Valid
	12	0,938 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	13	0,938 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	14	0,938 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	15	0,600 (positif)	0,000 < 0,05	Valid

Uji Reliabilitas Pengetahuan Agama (X₃)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,932	15

Uji Validitas Kesiediaan Pegawai ASN Membayar Zakat Profesi Melalui Potongan Gaji (Y₁)

Variabel	Item	Nilai Korelasi	Nilai sig (2-tailed)	Keterangan
Kesiediaan Pegawai ASN Membayar Zakat Profesi Melalui Potongan Gaji (Y ₁)	1	0,701 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	2	0,557 (positif)	0,001 < 0,05	Valid
	3	0,776 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	4	0,537 (positif)	0,001 < 0,05	Valid
	5	0,776 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	6	0,715 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	7	0,753 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	8	0,701 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	9	0,776 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	10	0,715 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	11	0,607 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	12	0,557 (positif)	0,001 < 0,05	Valid
	13	0,715 (positif)	0,000 < 0,05	Valid
	14	0,557 (positif)	0,001 < 0,05	Valid
	15	0,776 (positif)	0,000 < 0,05	Valid

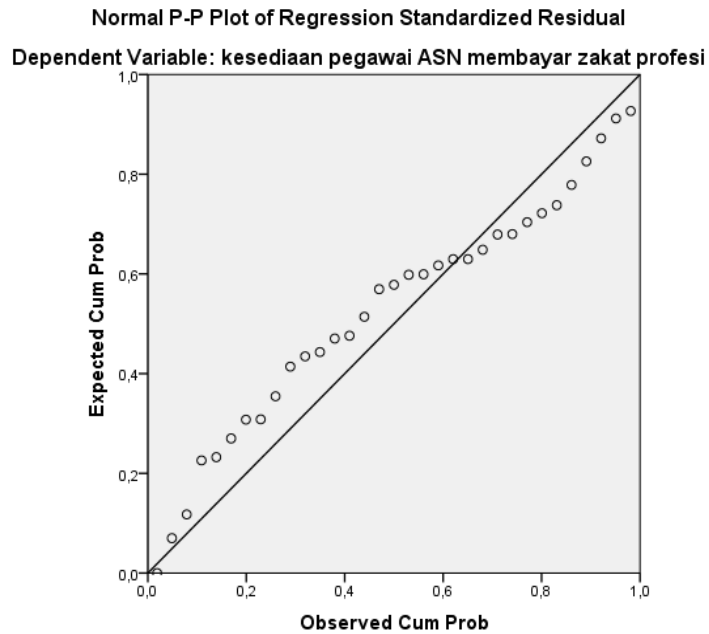
Uji Reliabilitas Kesiediaan Pegawai ASN Membayar Zakat Profesi Melalui Potongan Gaji (Y₁)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,907	15

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



2. Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-10,865	3,578		-3,036	,005		
kebijakan pimpinan	,350	,118	,284	2,966	,006	,266	3,762
pendapatan	,567	,101	,557	5,636	,000	,249	4,012
pengetahuan agama	,282	,087	,211	3,222	,003	,568	1,762

a. Dependent Variable: kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi

3. Uji Heteroskedastisitas Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,694	,351		1,981	,057
kebijakan pimpinan	-,059	,029	-1,769	-2,010	,054
Pendapatan	,064	,034	2,078	1,922	,065
pengetahuan agama	-,017	,012	-,514	-1,371	,181

a. Dependent Variable: RES2

C. Uji Hipotesis

1. Uji R²

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,964 ^a	,929	,922	1,30355	1,981

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Agama, Pendapatan, Kebijakan Pimpinan

b. Dependent Variable: Kesiediaan Pegawai Membayar Zakat Profesi

2. Uji F (Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	649,449	3	216,483	127,399	,000 ^b
Residual	49,278	29	1,699		
Total	698,727	32			

a. Dependent Variable: Kesiediaan Pegawai Membayar Zakat Profesi

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Agama, Pendapatan, Kebijakan Pimpinan

3. Uji t (Parsial)

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-10,865	3,578		-3,036	,005		
kebijakan pimpinan	,350	,118	,284	2,966	,006	,266	3,762
pendapatan	,567	,101	,557	5,636	,000	,249	4,012
pengetahuan agama	,282	,087	,211	3,222	,003	,568	1,762

a. Dependent Variable: kesediaan pegawai ASN membayar zakat profesi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Jamilah Harahap
Tempat, Tanggal Lahir : Sidikalang, 09 Mei 1997
Alamat : Jl. Usman Sidik Pasar IV No. 81 Bandar Khalipah
No. Hp : 0821 6050 9323
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan Terakhir : D-III Perbankan Syariah
Email : jamilahharahap97@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

(2002 – 2008) : MIN Medan Barat
(2008 – 2011) : MTs PP. Ar-raudhlatul Hasanah
(2011 – 2014) : MAS PP. Ar-raudhlatul Hasanah
(2014 – 2017) : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara